



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 6
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2005
TENTANG
RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN
KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

BUKU RINCI
BIDANG SISTEM KELEMBAGAAN DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

Bab 1	Pendahuluan	VI.1 - 1
Bab 2	Inventarisasi Kerusakan dan Kerugian	VI.2 - 1
Bab 3	Upaya yang Telah dan Sedang Dilakukan Pada Tahapan Tanggap Darurat	VI.3 - 1
Bab 4	Sasaran, Kebijakan dan Strategi Kelompok Kerja Sistem Kelembagaan	VI.4 - 1
4.1	Sasaran	VI.4 - 3
4.2	Kebijakan	VI.4 - 4
4.3	Strategi	VI.4 - 5
Bab 5	Detail Rencana Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	VI.5 - 1
5.1	Pokok – Pokok Program dan Kegiatan	VI.5 - 1
5.2	Detail Rencana Program dan Kegiatan	VI.5 - 3
5.3	Kebutuhan Biaya dan Produk yang Dihasilkan	VI.5 - 4

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Luas Wilayah NAD dan Nias Sebelum dan Sesudah Bencana	VI.2 - 6
Tabel 2.	Daftar Desa Yang Tenggelam di Kota Banda Aceh	VI.2 - 7
Tabel 3.	Rekapitulasi Kebutuhan Biaya Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	VI.5 - 4
Tabel 4.	Rencana Produk Kelompok Kerja Kelembagaan dan Lembaga yang Berwenang	VI.5 - 5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Jumlah Aparat Pemerintah Daerah di Provinsi NAD	VI.2 - 2
Gambar 2.	Korban Terbesar Aparat Pada Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal Provinsi NAD	VI.2 - 3
Gambar 3.	Luas Kabupaten/Kota Terparah Akibat Bencana	VI.2 - 7
Gambar 4.	Luas Desa Terparah Akibat Bencana di Kota Banda Aceh	VI.2 - 8

DAFTAR PETA

Peta 1.	Kondisi Sebaran Aparat Pemda Hilang dan Meninggal	VI.2 - 3
Peta 2.	Persebaran Kondisi Kecamatan dan Kelurahan yang tidak Berfungsi	VI.2 - 4

LAMPIRAN

LAMPIRAN A

Detail Rinci Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kelembagaan Pemerintah Daerah

Tabel A1 – Tahapan Kegiatan	L.VI - 2
Tabel A2 – Program dan Kegiatan Lintas Kabupaten	L.VI - 15
Tabel A3 – Program dan Kegiatan Per Kabupaten	L.VI - 24

LAMPIRAN B

Kompilasi Data

Tabel B1 - Data Kondisi Aparat Pemda Pada Instansi Vertikal di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	L.VI - 52
Tabel B2 - Rekap PNS Provinsi, Kabupaten/Kota Korban Gempa Bumi Dan Tsunami	L.VI - 54
Tabel B3 - Data Kondisi Bangunan Kantor di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	L.VI - 56
Tabel B4 - Perkiraan Kebutuhan Biaya Sektor Pemerintahan	L.VI - 58
Tabel B5 - Rekapitulasi Bantuan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Untuk Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi NAD dan Sumatera Utara	L.VI - 60

LAMPIRAN C

Struktur Model Kelembagaan Tingkat Mukim Dan Gampong	L.VI - 65
---	------------------

BAB 1

PENDAHULUAN

Bencana alam gempa bumi tektonik dan gelombang tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 telah berdampak luas pada wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara. Bencana alam tersebut bukan hanya menyebabkan tewasnya ratusan ribu warga NAD dan Sumatera Utara tetapi juga menewaskan sejumlah aparatur pemerintah dan hancurnya sebagian sarana dan prasarana pemerintah.

Berdasarkan data terakhir dan penilaian dari Posko Penanggulangan Bencana NAD dan Sumatera Utara, 14 kabupaten dari 21 kabupaten/kota di Banda Aceh mengalami kerusakan. Empat (4) daerah (kabupaten/kota) yang mengalami kerusakan terparah adalah Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Besar, Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Jaya. Sedangkan di Sumatera Utara, ada 6 kabupaten/kota dari 23 kabupaten/kota daerah (kabupaten/kota) yang terkena dampak bencana yaitu Kabupaten Nias, Kabupaten Serdang Begadai, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga. Dua (2) daerah (kabupaten) yang mengalami kerusakan terparah yaitu Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan. Kerusakan-kerusakan dan meninggalnya aparatur pemerintah tersebut telah mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum.

Untuk menanggulangi akibat bencana tersebut, maka Pemerintah telah melakukan langkah-langkah tertentu untuk mengaktifkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum. Dalam dokumen ini akan dipaparkan langkah-langkah yang telah dilaksanakan pada sisa tahap tanggap darurat, tahap rehabilitasi, dan tahap rekonstruksi.

BAB 2

INVENTARISASI KERUSAKAN DAN KERUGIAN

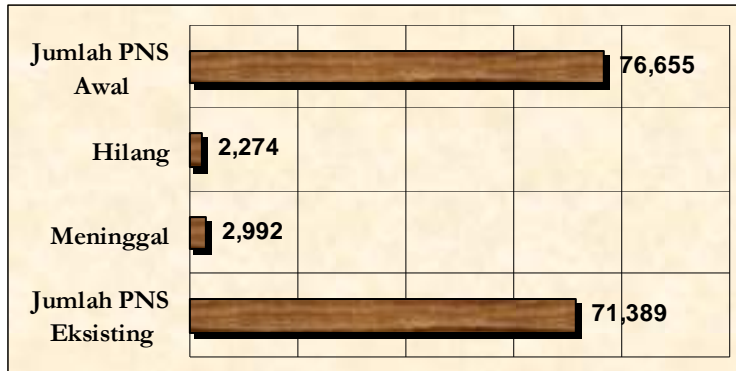
Bencana alam gempa dan Tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 di Provinsi NAD dan Sumatera Utara telah mengakibatkan permasalahan dan perubahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Secara umum, permasalahan pokok dalam bidang pemerintahan daerah akibat bencana, adalah sebagai berikut:

1. Tercerai berainya anggota komunitas adat (akibat bencana) serta rusaknya sarana dan prasarana tempat berkumpul (meunasah dan balenya) menyebabkan tidak optimalnya lembaga adat yang ada.
2. Belum berjalannya fungsi lembaga-lembaga agama dan adat yang telah ada sejak dahulu dan diperkuat keberadaannya oleh UU No. 18/2001.
3. Terjadinya permasalahan individual dan traumatik para PNS akibat kehilangan anggota keluarga ataupun harta benda.
4. Berkurangnya pegawai khususnya pada beberapa Provinsi/Kabupaten/Kota. *(Meninggalnya guru dan tenaga kesehatan menyebabkan proses belajar mengajar dan pelayanan kesehatan dasar tidak dapat berjalan dengan baik di beberapa wilayah)*
5. Hilangnya kepemimpinan daerah akibat hilang dan meninggalnya kepala daerah dan sebagian anggota legislatif.
6. Banyaknya sarana dan prasarana pemerintahan yang tidak berfungsi dan rusak terutama untuk tingkat kecamatan dan kelurahan/desa/mukim, yang menyebabkan turunnya pelayanan pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
7. Hilangnya wilayah dan beberapa desa akibat bencana tsunami yang menyebabkan berubahnya luas dan batas wilayah administrasi.
8. Tidak kondusifnya penyelenggaraan pemerintahan dan fungsi lembaga agama, adat, dan sosial lainnya akibat adanya gangguan keamanan.

Permasalahan tersebut dapat dipaparkan melalui inventarisasi data-data rinci mengenai kerusakan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut ini : (a) jumlah dan kualitas sumberdaya aparatur; (b) sarana prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan mulai tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa; (c) hilangnya sebagian Kepala daerah dan aparatur pemerintah daerah serta anggota DPRD; (d) administrasi kependudukan; dan (e) batas administrasi.:

- a. *Jumlah dan kualitas sumberdaya aparatur.* Dari sejumlah 7.110 pegawai pada Pemerintah Daerah Provinsi NAD yang tersebar di Sekretariat Daerah/Kantor dan Dinas Provinsi, tercatat sebanyak 435 orang aparat meninggal dunia dan 582 orang dilaporkan hilang. Dari segi kualitas, data korban berdasarkan eselonering di Prov.NAD (belum termasuk kab/kota): eselon II – 3 orang, eselon III – 31 orang, eselon IV – 125 orang. Berdasarkan data dari lapangan, jumlah aparat pemerintah daerah di seluruh di Provinsi NAD (Provinsi, Kabupaten/Kota) berjumlah 76.655 orang aparat. Dari jumlah tersebut aparat yang meninggal dunia sebanyak 2.992 orang, sementara yang dilaporkan hilang sebanyak 2.274 orang.

Gambar 1
Jumlah Aparat Pemerintah Daerah
di Provinsi NAD (Provinsi , Kabupaten/ Kota)



Sumber : Sekretariat Daerah Provinsi NAD, 28 Februari 2005

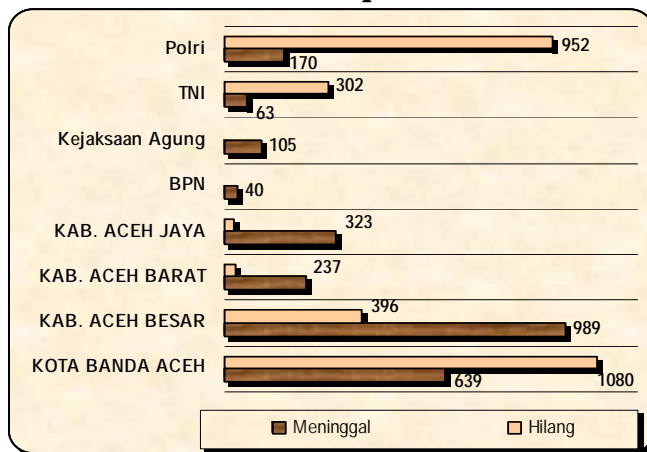
Sedangkan kondisi aparatur di daerah Kabupaten/Kota yang menjadi korban terbesar terdapat pada empat kabupaten/kota, yaitu: (1) Kota Banda Aceh, (2) Kabupaten Aceh Besar, (3) Kabupaten Aceh Barat, dan (4) Kabupaten Aceh Jaya, dilaporkan sebagai berikut:

- i. **Kota Banda Aceh.** Dari jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang masuk kerja hingga saat ini (28 Februari 2005), dari 5.892 pegawai Kota Banda Aceh terdapat 639 orang meninggal dan 1.180 orang hilang.
- ii. **Kabupaten Aceh Besar,** dari 7.150 pegawai, 989 orang diantaranya dilaporkan meninggal dan 396 orang hilang.
- iii. **Kabupaten Aceh Barat,** dari 3.989 pegawai, 237 orang meninggal dan 32 orang hilang
- iv. **Kabupaten Aceh Jaya,** dari 1.190 pegawai, 323 orang meninggal dan 29 orang hilang.

Untuk instansi vertikal, kondisi kepegawaian yang berhasil dikumpulkan adalah dari BPN, Kejaksaan Agung, TNI, dan Polri.

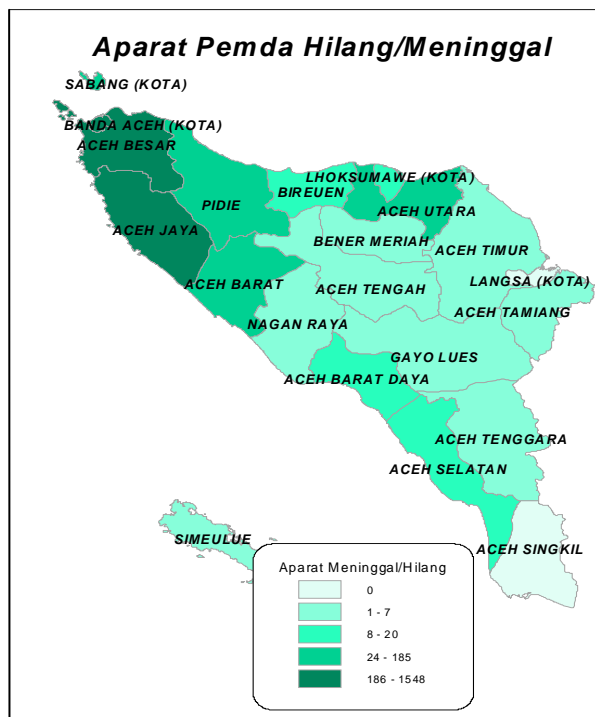
- i. **BPN :** PNS meninggal 40 orang, suami/istri dan anak PNS meninggal 226 orang, PNS kehilangan anak 31 orang, PNS sakit 94 orang, PNS mengungsi 75 orang, PNS kehilangan rumah 35 orang
- ii. **Kejaksaan Agung:** PNS meninggal sebanyak 105 orang
- iii. **TNI:** PNS meninggal sebanyak 63 orang dan hilang sebanyak 302 orang
- iv. **Polri:** PNS meninggal sebanyak 170 orang dan hilang sebanyak 952 orang.

Gambar 2
Korban Terbesar Aparat
Pada Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal Provinsi NAD
(Provinsi , Kabupaten/ Kota)



Sumber: Sekda NAD, BPN, Kejaksaan Agung, TNI, dan Polri - Februari 2005

Peta 1 – Kondisi Sebaran Aparat Pemda Hilang dan Meninggal



Sumber : Depdagri, Februari 2005

- b. *Bangunan sarana dan prasarana gedung perkantoran* di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam pasca bencana yang mengalami tingkat kerusakan relatif tinggi terdapat di wilayah: (1) Pemerintah Provinsi NAD, (2) Kota Banda Aceh, (3) Kabupaten Aceh Barat, (4) Kabupaten Aceh Besar dan (5) Kabupaten Aceh Jaya. Berdasarkan data terakhir, akibat gempa pada tanggal 28 Maret 2005, kerusakan bangunan juga terjadi pada Kantor

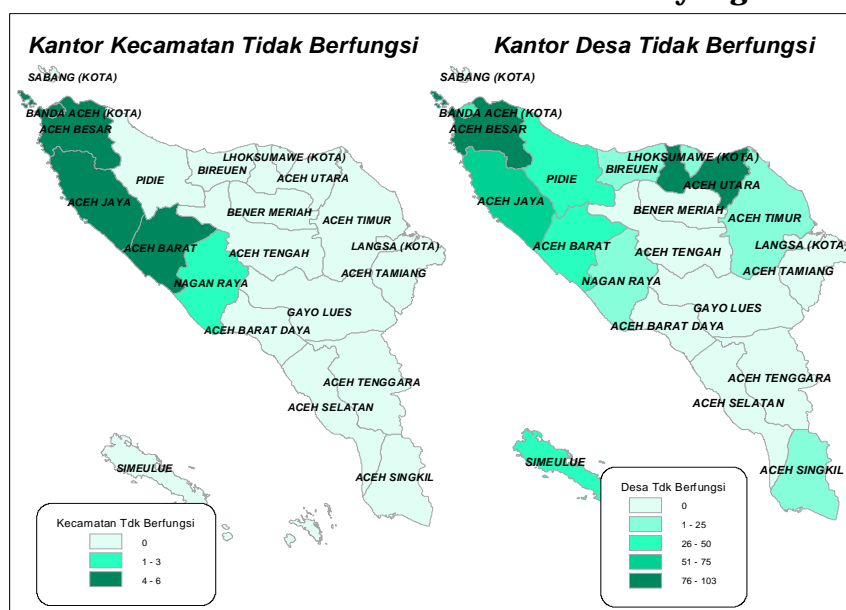
Bupati Kabupaten Simeuleu. Sedangkan kerusakan bangunan pada Kabupaten Nias yaitu rusakny 1 kantor bupati dan 4 kecamatan.

Sementara untuk Kantor Gubernur yang juga mengalami kerusakan dengan indikasi tingkat kerusakan 70%, telah diupayakan untuk segera difungsikan secara optimal dan saat ini telah dimanfaatkan sebagai pusat pengendali bencana/Posko Bakornas PBP di Provinsi Aceh.

Kerusakan penampakan fisik wilayah di lapangan melalui pendekatan *guess-estimate*, tertinggi terjadi di (1) **Kabupaten Aceh Jaya**, dengan perkiraan tingkat kerusakan mencapai **85%**. Kabupaten/kota lainnya yang tingkat kerusakan cukup signifikan antara lain: (2) **Kab. Aceh Besar (80%)**, **Kota Banda Aceh (75%)**, dan **Kab. Aceh Barat (60%)**.

Pada tingkat kecamatan, yang tidak berfungsi 24 Kecamatan dari 241 kecamatan. Kabupaten/Kota yang jumlah kecamatannya lebih dari 50 % masih belum berfungsi adalah Kabupaten Aceh Jaya. Pada tingkat desa/kelurahan, yang tidak berfungsi sebanyak 640 kelurahan/desa dari 5.947 desa/kelurahan yang ada. Perkiraan kerugian bidang pemerintahan sebesar Rp. 338,835 Milyar akibat kerusakan gedung pemerintahan tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan/Kelurahan/Desa, rusaknya peralatan dan dokumen serta hilang/meninggalnya aparatur. Kondisi kecamatan dan kelurahan/desa yang tidak berfungsi dapat dilihat pada peta 2 berikut ini:

Peta 2
Persebaran Kondisi Kecamatan dan Kelurahan yang tidak Berfungsi



Sumber: Depdagri, Februari 2005

Kerusakan pada instansi vertikal yang berhasil dikompilasi adalah instansi BPN, kejaksaan, Departemen Hukum, HAM, Lembaga Komunikasi dan informasi serta kantor Polri seperti berikut ini:

- Kerusakan gedung kantor BPN yang terjadi disebabkan oleh gempa dan gelombang tsunami serta terendam air, meliputi: (i) Gedung Kanwil BPN Provinsi yang berlantai 3, terjadi kerusakan pada lantai 1; (ii) Gedung Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh

- berlantai 1, rusak berat dan tidak dapat lagi digunakan; (iii) Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat berlantai 1, mengalami kerusakan ringan
- Kantor yang mengalami kerusakan sarana dan prasarana kerja adalah : Kanwil BPN Propinsi (seluruh sarana dan prasarana, termasuk komputer yang hilang karena penjarahan), Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh (meubelair, peralatan kantor, komputer, dan alat ukur tanah), serta Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat (AC 1 unit, komputer 7 unit, theodolit 2 unit, meubelair, kompas).
 - Kanwil BPN Provinsi : Dokumen keuangan, kepegawaian dan surat menyurat yang terdapat di lantai 1 hilang dan rusak karena terendam air. Dokumen Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah 20% hilang/rusak.
 - Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh: keadaan sampai dengan tanggal 12 Januari 2005 warkah 40% rusak. Buku tanah, surat ukur, dan gambar situasi sebanyak 10% sedang diupayakan penyelamatan, selebihnya dalam keadaan baik. Blanko sertifikat rusak karena terendam air.
 - Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh barat: Buku tanah dan warkah 10% basah, dan sementara ini dalam proses pengeringan, dan seluruh blanko sertifikat tidak dapat dimanfaatkan karena rusak terendam air.
 - Kantor Kejaksaan yang tidak berfungsi sebanyak 6 gedung.
 - Kantor Departemen Hukum dan HAM yang tidak berfungsi sebanyak 6 gedung.
 - Kantor Lembaga komunikasi yang tidak berfungsi sebanyak 8 gedung.
 - Kantor Polri yang tidak berfungsi sebanyak 34 gedung dari jumlah total 174.
- c. *Kepala Daerah.* Kepala daerah/pemerintah daerah yang didata adalah yang meninggal, hilang dan akan berakhir masa jabatannya. Pejabat pemerintah daerah yang **meninggal** adalah Walikota Banda Aceh, sedangkan pejabat yang masih hilang adalah Bupati Aceh Barat Daya dan seorang camat. Kepala Daerah dan Pejabat Kepala Daerah di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam yang akan berakhir **masa jabatannya** pada tahun 2005 adalah sebagai berikut:
- 1) Gubernur Provinsi NAD berakhir tanggal 25 Nopember 2005;
 - 2) Penjabat Bupati Bener Meriah berakhir tanggal 22 Januari 2005;
 - 3) Walikota Sabang berakhir tanggal 8 Pebruari 2005;
 - 4) Bupati Aceh Timur berakhir tanggal 13 Pebruari 2005
 - 5) Penjabat Walikota Banda Aceh, Bupati Aceh Tengah, Bupati Aceh Utara, Bupati Aceh Besar, Bupati Aceh Barat, Walikota Lhokseumawe, Walikota Langsa, Bupati Aceh Jaya, Bupati Nagan Raya, Bupati Gayo Lues, Bupati Aceh Barat Daya, Bupati Aceh Tamiang, berakhir tanggal 18 Pebruari 2005;
 - 6) Bupati Aceh Singkil berakhir tanggal 30 Mei 2005.
- d. *Anggota DPRD.* Sementara Anggota DPRD Provinsi yang meninggal 3 orang dan Anggota DPRD Kabupaten Aceh Barat 1 orang.
- e. *Administrasi Kependudukan.* Jumlah keseluruhan penduduk di Banda Aceh adalah sebesar 4.204.904 orang. Dari jumlah tersebut, penduduk yang meninggal terdapat sebanyak 126.602 orang dan hilang sebanyak 93.638 orang. Sedangkan pengungsi sampai tanggal 21 Maret 2005 sebesar 514.150 orang. Untuk Kabupaten Nias jumlah penduduk yang meninggal dunia dan hilang akibat gempa dan Tsunami sebanyak 154 orang, sedangkan jumlah pengungsi di Nias sebanyak 1.780 orang dari 392 keluarga.
- f. *Administrasi Wilayah.* Bencana yang terjadi telah menyebabkan adanya perubahan batas administrasi wilayah. Perubahan luas wilayah yang cukup besar terjadi di Banda Aceh, yaitu mencakup sampai 67 % dari luas awal. Sedangkan untuk wilayah desa, rata-rata

mengalami perubahan akibat desa yang tenggelam sekitar 10% sampai 20%, dengan perubahan terbesar terdapat pada Desa Ule Lhee (dari 67 Ha menjadi 54 Ha) dan Desa Alue Naga (dari 242 Ha menjadi 194 Ha).

Tabel 1
Luas Wilayah Di Aceh Dan Sumatera Utara (Nias)
Sebelum Dan Sesudah Bencana

No	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)	Daerah yang terkena bencana tsunami (Ha)	Daerah yang tidak terkena bencana tsunami (Ha)	Jumlah tanah yang terdaftar (Ha)	Perkiraan jumlah bidang tanah (Ha)
1	Kota Banda Aceh	6,136	4,130	2,006	70,000	260,000
2	Kota Sabang	11,872	50	11,822	3,993	14,700
3	Kabupaten Aceh Besar	268,612	695	267,917	26,574	94,500
4	Kabupaten Pidie	416,055	480	415,575	36,358	134,500
5	Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Simeulue	1,404,708	8,000	1,396,708	51,086	189,000
6	Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Aceh Singkil	694,515		694,515	32,391	120,000
7	Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah	577,248		577,248	34,069	126,000
8	Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireuen dan Kota Lhokseumawe	538,042	255	537,787	99,858	369,000
9	Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, dan Kabupaten Aceh Tamiang	824,273		824,273	31,763	117,600
10	Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Luwes	995,096		995,096	19,663	72,900
Jumlah		5,736,557	13,610	5,722,947	405,755	1,498,200

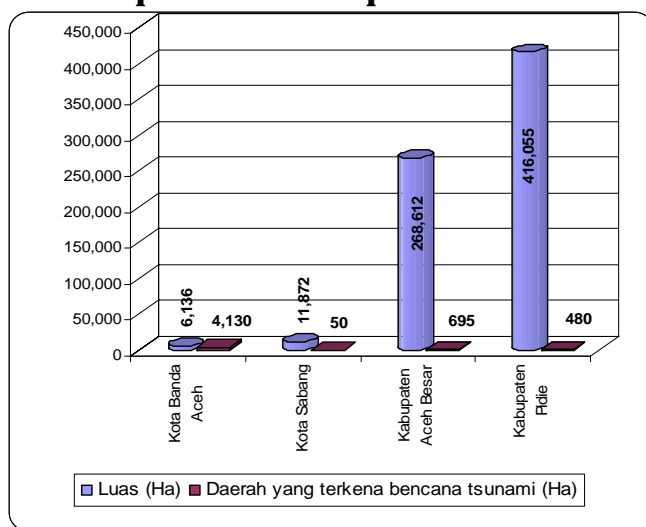
Sumber: BPN versi Februari 2005.

Tabel 2
Daftar Desa yang Tenggelam Akibat Bencana Gelombang Tsunami
Di Kota Banda Aceh

No	Kecamatan	Desa	Luas	Perkiraan Tenggelam		Sisa Luas
				%	Luas (Ha)	
1	Meuraxa	1. Ule Lhee	67.5	20	13.5	54
		2. Asoi Nanggroe	16.8	10	1.668	15.12
2	Syiah Kuala	1. Tibang	230.8	15	34.62	196.18
		2. Alue Naga	242.6	20	48.52	194.08
		3. Deah Raya	178.2	10	17.82	160.38
3	Kuta Raja	1. Gampong Jawa	150.6	10	15.06	135.54
4	Jaya Baru	1. Ulee Pata	19	10	1.9	17.1
Jumlah			905.5		133.088	772.4

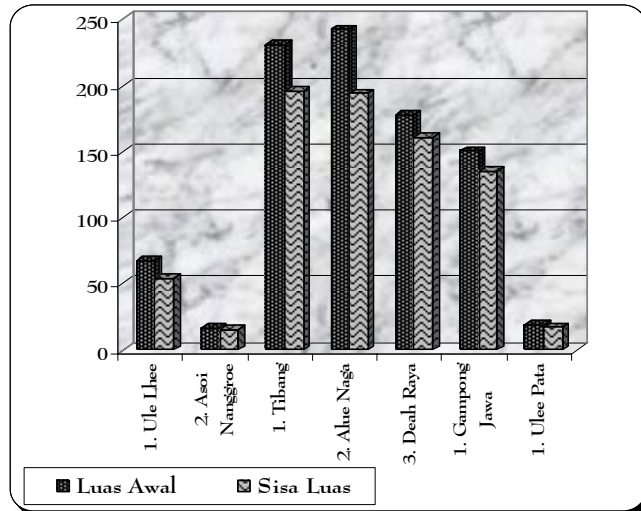
Sumber : BPN, versi Februari 2005.

Gambar 3
Luas Kabupaten/Kota Terparah Akibat Bencana



Sumber : BPN, Februari 2005

Gambar 4
Luas Desa Terparah Akibat Bencana di Kota Banda Aceh



Sumber : BPN, Februari 2005

BAB 3
UPAYA YANG TELAH DAN SEDANG DILAKUKAN
PADA TAHAPAN TANGGAP DARURAT

Guna mengatasi permasalahan dan harapan masyarakat terhadap berfungsinya kembali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam pasca Bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami, pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah kebijakan dan aksi pemulihan antara lain:

A. DEPARTEMEN DALAM NEGERI (28 Januari 2005)

1. Mengingat kondisi aparatur di NAD yang masih traumatik, sehingga belum dapat memberikan kinerja yang baik, Departemen Dalam Negeri telah menurunkan Tim Pendamping ke 20 Kabupaten/Kota dan Provinsi sejumlah **356 orang yang terdiri dari Pejabat Esselon I, II, III dan IV serta Dosen Pengasuh dan Praja IPDN**, dengan kegiatan antara lain :
 - a. Mengkoordinasikan aparatur yang ada dalam rangka pembersihan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pemerintahan yang hancur, dan membangun tenda-tenda darurat sebagai tempat kerja aparatur untuk melayani kebutuhan masyarakat.
 - b. Menggalang solidaritas untuk meringankan beban aparat Pemda yang mendapat musibah, melalui bantuan dalam bentuk uang duka dari Bupati/Walikota.
 - c. Melakukan pendataan terhadap kebutuhan personil PNS kedepan dan menyusun rencana kerja jangka pendek untuk penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan Strategi Pemulihan yang telah disusun.
 - d. Melakukan penguatan terhadap posko-posko bencana yang dibentuk Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - e. Melakukan pemetaan tingkat kerusakan dan tingkat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan di Provinsi NAD.
2. Sedang disusun penataan dan perencanaan pegawai dengan merealokasi pegawai antar Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi NAD sesuai dengan kebutuhan.
3. Pada saat setelah kejadian tsunami, pemerintah daerah Kota Banda Aceh ditangani oleh Wagub berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, tugas-tugas pemerintahan di Kota Banda Aceh ditangani oleh Pejabat Walikota baru yang telah diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
4. Terkait dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi NAD pada bulan Februari 2005, telah diantisipasi dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005** tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditentukan dalam pasal 149 yang berbunyi sebagai berikut : “dalam hal disuatu daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan tidak dapat terlaksananya pemilihan, pelaksanaan pemilihan akan disesuaikan dan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya”.
5. Guna melakukan pendataan dan penanganan warga yang selamat, bagi kecamatan dan desa/kelurahan yang belum berfungsi, didirikan posko yang digerakkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
6. Kerusakan fisik wilayah yang diketahui melalui metode guess-estimate, sedang didata kembali dan dilakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di pusat maupun di daerah, sehingga diketahui secara teknis kerusakan fisik wilayah.

7. Agar proses belajar mengajar dan pelayanan kesehatan masyarakat dapat berjalan dan terkoordinasikan secara efisien dan efektif sedang dilakukan pendataan fisik dan non fisik bangunan sekolah dan puskesmas serta berkoordinasi dengan instansi terkait dalam menyusun perencanaan dan penganggaran.
8. Mengefektifkan koordinasi atas semua komponen yang saat ini terlibat dalam kegiatan evakuasi dan penyelamatan terhadap korban bencana alam gempa dan tsunami di Prov NAD dengan cara mengefektifkan semua peralatan dan sumber daya yang ada.
9. Menyelenggarakan rapat koordinasi seluruh Bupati/Walikota, Ketua DPRD dan Ketua Bappeda pada tanggal 11 Januari 2005, yang antara lain menginstruksikan untuk membuat rencana konkrit pembangunan tempat-tempat pengungsian yang permanen dengan memperhatikan lokasi yang aman dan sehat.
10. Disamping menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dilapangan, Departemen Dalam Negeri telah mengambil kebijakan sebagai berikut :
 - a. Menerbitkan Inmendagri Nomor 8 Tahun 2004 tanggal 30 Desember 2004 tentang Langkah-langkah Penanganan Bencana Alam Gempa Bumi Dan Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Provinsi Sumatera Utara. Adapun langkah-langkah yang ditetapkan dalam Inmendagri tersebut sebagai berikut:
 - 1) Melakukan pendampingan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten kota dan kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum;
 - 2) Memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Kecamatan dalam koordinasi penanganan darurat (logistik dan penampungan) serta langkah-langkah evakuasi dan rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana;
 - 3) Melakukan inventarisasi korban meninggal, luka-luka, hilang, pengungsi, dan mendata sarana dan prasarana infrastruktur;
 - 4) Membantu Pemda mempersiapkan agenda penyusunan perencanaan recovery/rehabilitasi rekonstruksi pasca gempa bumi dan gelombang tsunami sesuai dengan kebutuhan lokal (bottom-up planning);
 - 5) Penggalangan solidaritas kebangsaan dan kesetiakawanan sosial dan sampai saat ini telah diberikan bantuan berupa dana, makanan, peralatan dan relawan medis oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang tidak terkena musibah sebesar Rp. 16.509.354.658 (enam belas milyar lima ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah). Disamping itu karyawan dan karyawan Departemen Dalam Negeri telah memberikan bantuan uang sebesar Rp. 372.259.000 (tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang langsung diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Wakil Gubernur Provinsi NAD pada tanggal 13 Januari 2005.
 - b. Menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 360-788 Tahun 2004 tanggal 30 Desember 2004 tentang Tugas Pendampingan Pejabat Departemen Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dan Kab/Kota serta Kecamatan pada Wilayah Bencana di Provinsi NAD. Tugas pendampingan tersebut meliputi dukungan dalam koordinasi penanganan darurat serta langkah-langkah rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana. Pendampingan ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada aparat di Propinsi, Kabupaten/Kota hingga Kecamatan untuk memulihkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta kesiapan Pemerintah Daerah dalam agenda rehabilitasi/rekonstruksi.

- c. Mendirikan Posko Penanganan Bencana Alam - oleh Depdagri selama 24 Jam, dengan alamat Ditjen Pemerintahan Umum – Departemen Dalam Negeri, Jl. Kebon Sirih No. 31, Jakarta Pusat, Telp. 021 – 3140186.
- d. Koordinasi dengan Departemen/Instansi terkait, seperti: Departemen Perhubungan dalam aspek telekomunikasi dan perhubungan/transportasi; Departemen Pekerjaan Umum dalam aspek penyediaan alat-alat berat dan prasarana jalan; Departemen ESDM dalam aspek kelistrikan dan penyediaan BBM; dengan Pemda Sumsel dalam aspek mobilisasi dukungan peralatan Radio Satelit, Genset, dan obat-obatan; dengan Pemerintah DKI Jakarta dalam aspek dukungan Tim Medis dan penyediaan peralatan medis.
- e. Dukungan internasional melalui NGO seperti Islamic Relief, Care International dan Plan International; melalui lembaga bilateral seperti USAID, JICA; melalui lembaga multilateral seperti UN, WB, ADB, yang dikoordinasikan Ditjen Bangda dan Posko DDN.
- f. Meminta kepada Gubernur seluruh Indonesia melalui radiogram untuk menggalang solidaritas dan kesetiakawanan dengan memberikan bantuan serta mendirikan posko di setiap Bandara, termasuk kepada Gubernur se-Sumatera dan DKI Jakarta melalui radiogram untuk mengirimkan bantuan tenaga medis.
- g. Meminta kepada Wakil Gubernur Provinsi NAD melalui Radiogram untuk memberikan motivasi kepada seluruh aparaturnya guna mempercepat proses pemulihan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan di setiap lini pemerintahan.
- h. Melaksanakan apel pada tanggal 6 Januari 2005 yang diikuti sekitar 300 pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi NAD. Dilaporkan bahwa kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi NAD saat ini telah berjalan sekitar 50%.
- i. Dalam rangka tertib administrasi dan tertib anggaran serta pengamanan anggaran APBD 2004, Pemerintah Provinsi NAD yang difasilitasi oleh Tim Pendampingan Depdagri telah menerbitkan:
 - 1) Surat Gubernur Provinsi NAD No. KU 900/II/2005 tanggal 8 Januari 2005 perihal Tertib Administrasi dan Disiplin Anggaran kepada Kepala Dinas/Badan dan Unit Kerja untuk melakukan berbagai hal terkait dengan tugas masing-masing.
 - 2) Surat Sekretaris Daerah Provinsi NAD No. KU 903/0013/2005 tanggal 11 Januari 2005 perihal Pemblokiran Dana APBD pada Pemegang Kas kepada Direktur Utama PT. BPD Aceh dalam rangka pengamanan dan penyelamatan dana APBD Tahun 2004.
- j. Dalam mendukung kelancaran penanganan pasca gempa bumi dan tsunami serta peningkatan pelayanan masyarakat, Tim Pendampingan Depdagri telah memfasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi cq Wakil Gubernur Provinsi NAD antara lain dalam penyusunan surat-surat yang ditujukan kepada Bupati/Walikota dan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi NAD antara lain :
 - 1) Surat tanggal 17 Januari 2005 tentang Peningkatan Pelayanan dan Penyampaian Informasi/Publikasi.
 - 2) Surat tanggal 17 Januari 2005 tentang Pembinaan Administrasi Kependudukan.
 - 3) Surat tanggal 18 Januari 2005 tentang Penanganan Sampah.
 - 4) Surat tanggal 19 Januari 2005 tentang Mobilisasi Pemuda, Karang Taruna dan LSM untuk evakuasi.
 - 5) Surat tanggal 20 Januari 2005 tentang Pemulihan Kejiwaan dan Mental Masyarakat.

- k. Melakukan Rapat Koordinasi dengan Pangdam Iskandarmuda, Kapolda, Wagub Provinsi NAD , Walikota Aceh, Bupati Aceh Besar beserta Camat Kota Aceh dan Kabupaten Aceh Besar dalam rangka percepatan pembuatan identitas sementara penduduk sebagai pengganti KTP yang dilakukan uji coba di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Selain melakukan tugas pendampingan, praja IPDN melakukan bakti sosial kepada para pengungsi di daerah Lampeunerut Kabupaten Aceh Besar dengan menggalang dana bantuan dari internal Praja dan didukung juga oleh Kas Dana Abadi Kerohanian Islam Praja IPDN Jatinangor.

B. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2 Februari 2004)

Melaksanakan inventarisasi data PNS dan pensiunan PNS/pensiunan pejabat negara serta janda/dudanya di Provinsi NAD dan Sumatera Utara (Nias), seperti berikut ini:

- i. Sinkronisasi data PNS yang ada di Provinsi NAD/Sumatera Utara yang mengalami bencana alam dengan data BKN.
- ii. Identifikasi data korban bencana, sehingga dapat tersusunnya data PNS/pejabat negara yang meninggal dunia/hilang.
- iii. BKN bersama dengan pengelola kepegawaian terkait mengidentifikasi data korban bencana yang meninggal dunia dan hilang, melalui posko/keluarga.
- iv. BKN dalam melakukan tugasnya berkoordinasi dengan: PT TASPEN dan PT. ASABRI untuk data pensiunan PNS/Janda/Duda serta pensiunan pejabat negara dan janda dudanya.
- v. Inventarisasi data PNS yang rumahnya rusak berat/hancur akibat bencana alam, koordinasi dengan pemda Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing serta Bapertarum.

C. SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NAD

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan/dilakukan dalam rangka administrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi NAD pasca gempa dan tsunami adalah sebagai berikut:

1. Pendataan PNS Provinsi NAD, dilakukan melalui: i) pendaftaran pada Biro Kepegawaian Setda Prov. NAD, ii) pendaftaran pada instansi masing-masing, iii) pendaftaran dengan menerjunkan petugas Biro Kepegawaian Setda Prov. NAD, iv) pendaftaran pada Posko mobil PNS Biro Kepegawaian Setda Prov. NAD.
2. Pendataan PNS Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah Daerah.
3. Data yang diperoleh berdasarkan masukan dari instansi Provinsi NAD.
4. Dikeluarkannya surat Gubernur No.Peg.800/002 tanggal 25 Januari 2005 yang menginformasikan: diminta kepada semua unit kerja untuk membangun barak tempat tinggal sementara PNS yang rumahnya rusak berat/hancur.
5. Menghimpun data dari instansi yang menyangkut jabatan PNS yang menjadi korban gempa dan tsunami.
6. Penataan data korban PNS lengkap sehingga diketahui instansi yang mengalami kekurangan dan tenaga yang dibutuhkan.
7. Mengadakan ceramah keagamaan kepada PNS dan keluarganya.
8. Usul kebutuhan personil dipersiapkan oleh masing-masing instansi ke BKD Prov. NAD.
9. Proses oleh BKD Prov. NAD dengan Tim BKN Regional VI Medan.
10. Surat kepada Menko Kesra untuk permintaan bantuan (surat Gubernur No.Peg.800/0023 tanggal 25 Januari 2005).

11. SK Pensiun PNS diharapkan telah diterima oleh ahli waris pada bulan Maret 2005, sehingga pensiun dapat diambil per 1 Mei 2005.
12. Pendataan kerusakan sarana dan prasarana perkantoran Pemda Provinsi NAD
13. Pendataan kendaraan dinas roda 2 dan 4 serta barang inventaris lainnya pada Dinas/Badan/Lembaga Daerah Provinsi NAD yang hilang dan rusak.
14. Pendataan kondisi kerusakan puskesmas/PUSTU pada Kabupaten/Kota di Provinsi NAD.

D. UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan/dilakukan dalam rangka pendataan tenaga edukatif, tenaga administratif dan honorer adalah sebagai berikut:

1. Pendataan korban jiwa dan tempat tinggal tenaga edukatif, administratif dan honorer.
2. Pendataan kendaraan dinas yang rusak akibat terendam banjir dan tsunami.
3. Pendataan kerusakan barang inventaris lainnya.
4. Pendataan kerusakan prasarana pendidikan kampus.
5. Pendataan kondisi kerusakan peralatan dan bahan laboratorium.

BAB 4

SASARAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Secara garis besar, kelembagaan yang ada di NAD terbagi atas 2 bentuk kelembagaan besar yaitu : (1) kelembagaan pemerintahan; dan (2) kelembagaan agama, adat dan sosial lainnya. Akibat adanya gempa dan tsunami, pada daerah-daerah yang terkena bencana kedua bentuk kelembagaan tersebut, selama beberapa waktu tidak dapat menjalankan perannya secara optimal. Sedangkan untuk Nias, permasalahannya hanya pada kelembagaan pemerintahan di sebagian wilayah.

A. Kelembagaan Pemerintahan

Penyelenggaraan pemerintahan akan dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila didukung oleh aparatur pemerintahan yang secara kuantitas mendukung kebutuhan organisasi dan secara kualitas memenuhi persyaratan kompetensi, disamping dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Bencana alam yang telah terjadi menyebabkan lumpuhnya aspek pemerintahan provinsi dan daerah pada wilayah yang terkena bencana terhadap pelayanan publik. Banyak kantor pemerintahan terutama pada tingkat kecamatan dan kelurahan/desa yang mengalami kerusakan berat dan ringan. Pada saat ini (masa tanggap darurat), fungsi pelayanan umum dilaksanakan pada kantor-kantor darurat dengan sarana yang sangat terbatas. Kondisi ini perlu penanganan yang komprehensif dan terencana dengan baik termasuk rencana rehabilitasi maupun rencana rekonstruksinya

Dari segi aparatur pemerintahan, bencana telah menyebabkan sejumlah aparatur yang meninggal dan hilang. Dari jumlah keseluruhan 76.665 orang pegawai, sejumlah 2.992 meninggal dan 2.274 hilang. Selain dari segi kuantitas, kualitas aparatur pasca bencana mengalami penurunan yang cukup signifikan disebabkan kondisi traumatik yang dialami pasca bencana. Selain itu pada saat sekarang belum ada sistem dan prosedur yang memadai di dalam mengarahkan aparatur dalam menghadapi bencana, serta pelatihan-pelatihan yang memadai di dalam menghadapi bencana belum dilakukan secara rutin untuk meningkatkan kemampuan aparatur. Untuk mengatasi hal tersebut, akan ada kebijakan untuk melakukan penataan kembali aparatur pemerintahan daerah serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk kembali menjalankan fungsinya dalam pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih tanggap terhadap segala kondisi darurat pada masa yang akan datang.

Selain itu, dalam melaksanakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, diperlukan suatu usaha menjalin kerjasama dengan daerah (provinsi/kabupaten/kota) lain yang tidak terkena bencana (dalam bidang ekonomi, infrastruktur dan pembangunan lainnya). Kerjasama antar daerah juga diperlukan ketika perlu ditetapkan batas wilayah baru akibat hilangnya desa dan batas-batas wilayah. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu ada kebijakan untuk melakukan penataan kembali aparatur pemerintahan daerah serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk kembali menjalankan fungsinya dalam pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih tanggap terhadap segala kondisi darurat pada masa yang akan datang.

B. Kelembagaan Agama, Adat, dan Sosial Lainnya

Pelaksanaan dan implementasi penyelenggaraan pemerintahan berhubungan erat dengan lembaga agama, adat dan sosial lainnya yang berlandaskan budaya serta agama yang sangat kental. Aceh memiliki beberapa kekhasan struktur masyarakat tersendiri yang sesuai dengan syariat Islam, seperti struktur kelembagaan mukim dan gampong. Untuk memfasilitasi hal tersebut, maka perlu ada upaya untuk menciptakan mekanisme pelibatan masyarakat yang efektif melalui penguatan lembaga agama, adat, dan sosial lainnya yang ada di Aceh.

Lembaga tradisional yang telah ada sejak dahulu dan telah berfungsi dengan baik sebagai instrumen budaya lokal ini, keberadaan dan fungsinya menjadi lemah dan tidak optimal sebagai media interaksi maupun kegiatan sosial lainnya karena adanya konflik sosial dan gangguan keamanan yang selama ini terjadi. Melalui UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), lembaga-lembaga tradisional tersebut dikembangkan menjadi lembaga yang berfungsi sebagai lembaga sosial resmi daerah. Penguatan peran dan fungsi lembaga mukim dan gampong tersebut secara formal didasarkan pada UU No. 18 Tahun 2001 dan dijabarkan melalui beberapa qanun (Peraturan Daerah) dan beberapa petunjuk pelaksanaannya.

Selanjutnya, di dalam perjalanannya, operasi militer telah digantikan dengan operasi terpadu oleh penguasa darurat sipil melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2004. Pada masa ini, keberadaan lembaga mukim dan gampong secara bertahap telah berfungsi kembali namun masih belum optimal karena beberapa petunjuk pelaksanaan yang dianggap kurang jelas dan operasional. Kelembagaan mukim dan gampong terdiri dari tiga peran, yaitu Dewan Penasihat Mukim/Gampong, Dewan Ulama Mukim/Gampong, dan Perangkat Mukim/Gampong. Struktur serta penjelasan mengenai kelembagaan pada tingkat mukim dan gampong dapat dilihat pada lampiran C¹.

Ditambah lagi dengan adanya bencana alam gempa dan tsunami dimana sebagian besar masyarakat Aceh di wilayah yang terkena bencana menjadi korban bencana alam gempa dan gelombang Tsunami mengalami penderitaan fisik, baik berupa gangguan kesehatan maupun penurunan pelayanan kesehatan, serta penderitaan mental (depresi). Penderitaan masyarakat dari segi kesehatan dan pendidikan seperti yang telah dijelaskan pada bagian di atas telah menyebabkan hubungan antar individu atau interaksi sosial, yang selama ini telah berjalan dengan baik melalui lembaga-lembaga mukim dan gampong menjadi tidak berfungsi. Masyarakat yang menjadi korban bencana lebih memikirkan dirinya akibat kehilangan dan penderitaan keluarganya.

Dalam upaya memfungsikan kembali hubungan kekerabatan antar masyarakat dan kegiatan sosial lainnya melalui lembaga mukim dan gampong, maka perlu ada kebijakan dan strategi pemberdayaan lembaga agama, adat dan sosial yang ada di Aceh, terutama di wilayah yang terkena bencana agar berfungsi dengan baik sebagai media komunikasi dan kegiatan sosial dan masyarakat.

Didasarkan dari berbagai kondisi diatas, dalam melaksanakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi, pemulihan kelembagaan pemerintahan daerah mempunyai **tujuan** sebagai berikut: (1) memperkuat pemerintah daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik yang efektif, akuntabel dan transparan; (2) mengembangkan dan mengefektifkan ruang publik

¹ Sumber Referensi: *Konsepsi Pemulihan dan Percepatan Pembangunan Daerah Istimewa Aceh Tim Penanganan Khusus D.I. Aceh dan Irian Jaya. Bappenas. 2001*

yang dinamis dengan melibatkan semua stakeholder dalam proses perencanaan, formulasi kebijakan, pembuatan keputusan, monitoring dan evaluasi; (3) membangun dan memulihkan kembali infrastruktur untuk mendukung proses pelayanan publik.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, ruang lingkup kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kelembagaan mencakup pada poin-poin berikut ini:

- a. **Administrasi pemerintahan** meliputi : (1) penataan personil; (2) penganggaran (administrasi, legislasi,); (3) penataan dokumen administratif; (4) fungsi/kewajiban pemerintah (sistem dan prosedur).
- b. **Hubungan/interaksi antar lembaga pemerintah dan lembaga agama, adat dan sosial lainnya** meliputi: (1) sistem dan mekanisme kerja (Darsip, Otsus, Mahkamah Syariah); (2) Sistem informasi pendukung (kebijakan pemulihan ekonomi dan investasi, sarana dan prasarana ekonomi, sosial, dan sebagainya) (3) hubungan kelembagaan (Pemda-DPRD); (4) interaksi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat (kemitraan/partisipasi masyarakat).
- c. **Struktur organisasi pemerintah daerah** meliputi: (1) Sekretariat pemerintah daerah; (2) Badan dan Dinas; (3) Kecamatan, Mukim, Kelurahan/Desa/Gampong; dan (4) Jabatan Fungsional.
- d. **Pembangunan sarana dan prasarana** meliputi : (1) prasarana perkantoran (Pemda, DPRD); (2) prasarana pelayanan umum (meunasah dan bale) dan (3) aset bergerak dan supply (ATK, termasuk pemadam kebakaran, ambulans, dan peralatan mitigasi lainnya).
- e. **Sistem pemantauan & penegakan aturan main (monitoring and enforcement)**

Sedangkan kegiatan dan fungsi lembaga/Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Sumut ini dibahas tersendiri di dalam buku utama.

4.1. Sasaran

Dalam menjabarkan tujuan tersebut, maka pokja kelembagaan menetapkan sasaran yang hendak dicapai dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kelembagaan pemerintahan daerah dan kelembagaan agama, adat, dan sosial lainnya di Aceh sebagai berikut:

A. Kelembagaan Pemerintahan

1. Terlaksananya pendataan kerusakan dan kerugian akibat bencana tsunami dalam bidang kelembagaan pemerintahan daerah (penduduk, aparatur, bangunan pelayanan umum, serta sarana dan prasarana kantor pemerintahan).
2. Tersedianya dukungan terhadap trauma centre, media centre, sarana kerja, rehabilitasi kantor, pembangunan kantor darurat, serta pembangunan kantor pemerintahan sesuai rencana (masterplan rehabilitasi kantor dan rencana teknis pembangunan kantor).
3. Tersedianya aparatur pendukung untuk menjalankan kebutuhan masyarakat yang meningkat serta tersusunnya perangkat aparatur pemerintahan daerah yang profesional dan kompeten dalam tugasnya untuk menjalankan fungsi pemerintahan umum, perencanaan dan pengelolaan keuangan publik, menjalankan pelayanan publik, serta tanggap dalam mitigasi bencana.
4. Tersusunnya rencana dan perbaikan sistem dan prosedur dalam keadaan bencana/musibah untuk PNS dan keluarganya (sistem dan prosedur tunjangan bagi

- PNS dan keluarganya) serta rencana struktur kelembagaan dan perbaikan sistem dan prosedur kerja lembaga pemerintah daerah sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien, sesuai dengan kebutuhan penduduk yang dilayani.
5. Tertatanya keuangan daerah dan terkelolanya sumber dana dan pembiayaan pembangunan secara transparan, akuntabel, dan profesional.
 6. Meningkatnya kapasitas legislatif daerah dalam penyusunan rencana serta monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah.
 7. Tercapainya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah, termasuk yang mengatur tentang Otonomi Khusus Provinsi NAD, mahkamah NAD, serta kebijakan darurat sipil NAD.
 8. Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah yang terlaksana dalam forum kerjasama antar daerah;
 9. Tertatanya batas-batas administratif wilayah provinsi/ kecamatan/ kelurahan yang baru.

B. Kelembagaan Agama, Adat, dan Sosial Lainnya

1. Terlaksananya proses partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, serta kerjasama masyarakat dengan seluruh stakeholder dalam pemulihan serta penguatan kembali pemerintahan di Aceh.
2. Tersedianya fasilitas bagi lembaga agama, adat, dan sosial lainnya untuk tempat ibadah, pusat komunikasi dan informasi, balai musyawarah, tempat penyelesaian perkara, dan pusat kegiatan-kegiatan lainnya (meunasah).

4.2. Kebijakan

Selanjutnya, dalam upaya mempercepat pencapaian mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditentukan kebijakan dan strategi pokja kelembagaan dalam mencapai proses rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kelembagaan pemerintahan daerah di Aceh dan Sumut. Dasar pemikiran perumusan kebijakan ini adalah untuk mencapai fungsi dan peran kelembagaan yang optimal dalam menunjang pembangunan di daerah-daerah yang terkena dampak tsunami. Seluruh kebijakan dan strategi peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan kelembagaan agama, adat, dan sosial lainnya perlu dilakukan sesuai dengan kebutuhan terkini pasca-tsunami dan kondisi sosial masyarakat Aceh sebelum terkena bencana dan tetap dalam kerangka otonomi khusus sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001. Kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi kelembagaan daerah dan kelembagaan agama, adat, dan sosial lainnya mencakup hal-hal berikut ini:

A. Kelembagaan pemerintahan

1. **Memulihkan pemerintahan daerah** dalam jangka pendek untuk pelayanan umum darurat,
2. Meningkatkan **kapasitas pemerintahan** di daerah dalam jangka menengah
3. Mempercepat penyediaan **sarana dan prasarana** lembaga pemerintahan yang permanen

B. Kelembagaan Agama, Adat, dan Sosial Lainnya

1. Meningkatkan **peranserta lembaga agama, adat, dan sosial** lainnya tingkat mukim dan gampong dalam penyusunan rencana dan kebijakan.
2. **Memfasilitasi sarana dan prasarana** agama, adat, dan sosial lainnya tingkat mukim dan gampong.

4.3. Strategi Pokja

Strategi kegiatan pokja kelembagaan dalam mencapai proses rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kelembagaan Pemerintah Daerah disini bukan diarahkan untuk semata-mata mengisi kembali fungsi-fungsi yang sebelumnya ada, tetapi lebih untuk memastikan berjalannya fungsi-fungsi yang dibutuhkan sekarang, baik sebelumnya ada maupun tidak. Dengan demikian, kebijakan dan strategi perlu dilaksanakan sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan yang dinamis dan tuntutan perkembangan pembangunan daerah. Fokus kegiatan bidang kelembagaan daerah selain penguatan kelembagaan pemerintahan juga penguatan lembaga mukim dan gampong. Optimalisasi fungsi pada kedua lembaga tersebut disebabkan lembaga mukim dan gampong memiliki unsur pemberdayaan masyarakat dan kemandirian rakyat yang lebih dominan. (Berdasarkan Undang-Undang No 18/2001). Strategi pokja kelembagaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

A. Kelembagaan Pemerintahan

- (1) Melalui kebijakan pemulihan pemerintahan daerah, dalam jangka pendek diperlukan pelayanan umum darurat. Strategi yang ditempuh adalah:
 - a. Menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan umum melalui pemberian bantuan sementara aparat pusat kepada pemerintah daerah.
 - b. Melakukan evaluasi ketersediaan jumlah aparat dibandingkan dengan penduduk eksisting.
 - c. Melakukan prioritas rekrutmen, pelatihan, dan pendidikan secara khusus dan cepat untuk mengisi kekosongan aparatur yang meninggal.
 - d. Melakukan penanganan masalah administrasi kepegawaian (gaji, tunjangan, asuransi, dsb).
 - e. Melakukan pembersihan, perbaikan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pemerintahan yang masih dapat dipergunakan.
 - f. Mendukung ketersediaan kantor-kantor darurat tingkat kecamatan/mukim/kelurahan/desa.
 - g. Melakukan penyelamatan dokumen administrasi pemerintahan.
 - h. Melakukan penggalangan bantuan kerjasama antar daerah dalam pemberian bantuan keuangan, bantuan medis, dan peralatan lainnya.
 - i. Memulihkan batas-batas administrasi wilayah (kecamatan/kelurahan/desa).
 - j. Melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah, termasuk yang mengatur tentang Otonomi Khusus Provinsi NAD, mahkamah NAD, serta kebijakan darurat sipil NAD.
- (2) Setelah strategi diatas dilaksanakan, dalam jangka menengah dilakukan kebijakan meningkatkan kapasitas pemerintahan di daerah, dengan strategi yang akan dilakukan sebagai berikut:
 - a. Melakukan penataan dan penyediaan aparatur pemerintah daerah, legislatif, pimpinan daerah dan aparatur pusat.
 - b. Meningkatkan kemampuan aparatur Pemda dan anggota legislatif dalam proses penyusunan rencana daerah, dan pengelolaan keuangan daerah.

- c. Meningkatkan kemampuan aparaturnya Pemda dalam menghadapi ancaman bencana alam dan buatan, melalui pelatihan-pelatihan teknis manajerial dan pengembangan sistem deteksi dini.
 - d. Memperbaiki sistem administrasi pemerintahan daerah yang responsif terhadap perubahan-perubahan yang tidak diduga (bencana alam dan bencana buatan).
 - e. Memperbaiki dan menata struktur kelembagaan yang proporsional dan prosedur kerja sesuai dengan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab, untuk memenuhi SPM.
 - f. Menciptakan dan meningkatkan koordinasi serta kerjasama antar tingkat pemerintahan.
- (3) Untuk mempercepat pelayanan umum, maka kebijakan mempercepat penyediaan sarana dan prasarana lembaga pemerintahan yang permanen perlu dilakukan, melalui strategi:
- a. Merehabilitasi prasarana pemerintah daerah yang permanen berdasarkan masterplan dan rencana teknis (DED).
 - b. Menyediakan sarana kerja pemerintah daerah dan peralatan mitigasi bencana untuk mendukung pelayanan publik.
 - c. Memfasilitasi dan mendukung ketersediaan sarana dan prasarana trauma centre, sistem kehumasan Pemda, dan forum komunikasi.

B. Kelembagaan Agama, Adat, dan Sosial Lainnya

Di dalam pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan **peranserta lembaga agama, adat, dan sosial** lainnya tingkat mukim dan gampong, strategi yang akan dilakukan adalah:

1. Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga agama, adat, dan sosial lainnya dalam menghadapi ancaman bencana dan berpartisipasi dalam proses kebijakan publik melalui pelatihan-pelatihan teknis managerial, pengembangan sistem deteksi dini, serta pengembangan ruang dan mekanisme partisipasi.
2. Melibatkan perangkat mukim dan gampong dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
3. Meningkatkan peran dewan penasihat mukim dan gampong, serta dewan ulama mukim dan gampong dalam pengawasan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Selain itu dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan diatas, diperlukan sarana dan prasarana yang mempermudah stakeholder berinteraksi, untuk itu strateginya adalah:

1. Menyediakan sarana dan prasarana sosial lembaga agama, adat, dan sosial lainnya tingkat mukim dan gampong seperti pembangunan meunasah dan bale sebagai tempat bermusyawarah.

BAB 5
DETAIL RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH
DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NAD DAN KEPULAUAN NIAS
PROVINSI SUMATERA UTARA

5.1. Pokok-pokok Program dan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Secara umum, program dan kegiatan yang akan ditempuh dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi dalam tahun 2005 – 2009 adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah

Pada saat ini aparat berada dalam kondisi yang memprihatinkan akibat duka dan kehilangan keluarga maupun harta benda. Beban ini ditambah dengan banyaknya aparatur yang juga meninggal. Pada saat yang sama pekerjaan bertambah karena adanya kejadian luar biasa (kematian penduduk yang besar, kerusakan fasilitas (sarana dan prasarana umum) yang banyak). Untuk itu program ini akan memfokuskan pada memfungsikan kembali/mengoptimalkan aparat pemerintah daerah yang ada untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik dan perencanaan perbaikan (rehabilitasi dan rekonstruksi) dengan tidak melupakan akan hak dan kebutuhan pemulihan trauma bagi PNS.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah:

- a. Pemberdayaan dan fasilitasi aparat untuk menjalankan fungsi pemerintahan (penyusunan rencana daerah dan pengelolaan keuangan daerah) dan pelayanan umum serta mempersiapkan kapasitas untuk operasionalisasi dan implementasi rencana.
- b. Penanganan masalah administrasi kepegawaian, dukungan trauma bagi PNS dan keluarganya serta penyediaan sistem dan prosedur pasca bencana bagi PNS dan keluarganya.
- c. Pelaksanaan lanjutan upaya pemenuhan/penyediaan aparatur daerah melalui rekrutmen baru dan mutasi pegawai pemerintah daerah serta rencana pengelolaan kepegawaian.
- d. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam usaha mitigasi bencana.

2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Program ini ditujukan menata struktur, sistem dan prosedur kerja kelembagaan pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan potensi daerah yang perlu dikelola agar dapat berjalan secara efisien dan efektif.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah:

- a. Pemantapan kelembagaan pemerintah daerah sesuai dengan perubahan jumlah penduduk dan potensi daerah/pembangunan daerah.
- b. Penyediaan sarana dan kantor darurat, penyusunan masterplan rencana rehabilitasi kantor dan penyusunan rencana teknis bangunan serta pembangunan kantor sesuai dengan rencana teknis.
- c. Penataan sistem komunikasi dan kehumasan daerah (media centre).
- d. Penyusunan rencana perbaikan sistem dan prosedur kerja lembaga pemerintah daerah.
- e. Penataan dan peningkatan kapasitas pemerintah pada tingkat kecamatan/gampong.

- f. Bantuan operasionalisasi penyelenggaraan pelayanan tingkat desa.
3. **Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah**
Program ditujukan untuk meningkatkan kapasitas legislatif daerah dalam menata kondisi keuangan pendapatan asli daerah pasca bencana dan mengelola sumber-sumber pendanaan dari luar. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:
- Rencana keuangan daerah dan pengelolannya (monitoring dan evaluasi).
 - Peningkatan kapasitas legislatif daerah dalam penyusunan rencana dan monitoring pengelolaan keuangan daerah.
4. **Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah**
Dalam rangka pemulihan serta percepatan pembangunan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, maka penting untuk menciptakan suatu kerjasama yang holistik antara daerah (provinsi/kabupaten/kota). Hal ini berkaitan dengan rencana pembangunan infrastruktur, perekonomian, manajemen sumber daya alam, dan sebagainya, yang melalui lintas batas administrasi serta penetapan batas wilayah baru. Untuk itu, maka program ini bertujuan untuk mengidentifikasi, merencanakan, memfasilitasi, dan membentuk kegiatan fungsi strategis yang perlu dikerjasamakan. Adapun kegiatan pokoknya adalah:
- Optimalisasi jaringan kerjasama antar pemerintah daerah kabupaten/kota dan antar provinsi dalam bentuk forum kerjasama daerah.
 - Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah.
5. **Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah**
Saat ini, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki berbagai macam peraturan perundangan mulai dari penetapan otonomi khusus bagi Aceh sampai adanya kebijakan mengenai keadaan darurat sipil di Aceh. Untuk mencegah adanya peraturan yang saling tumpang tindih, maka program ini berupaya untuk menata peraturan perundang-undangan yang ada di Aceh, dengan nama kegiatan pokoknya sebagai berikut:
- Harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terdapat di Aceh.
6. **Program Penataan Administrasi Kependudukan**
Tujuan program ini untuk menata administrasi kependudukan dalam upaya mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk (untuk memperoleh hak dasar dalam perlindungan hukum dan rasa aman), tertib administrasi penduduk, tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu. Adapun kegiatan pokok pendataan penduduk dalam bidang kelembagaan di Aceh adalah:
- Pendataan penduduk yang meninggal dunia, hilang maupun selamat, serta formulasi data struktur penduduk dalam komposisi umur sebagai input bagi penataan kelembagaan pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan penduduk dan potensi daerah.
7. **Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**
Tujuan program ini untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian, pelestarian dan pendayagunaan nilai dasar kesejahteraan sosial, dan ketahanan sosial masyarakat

dalam bentuk mengefisiensikan lembaga swadaya masyarakat dan lembaga agama, adat, dan sosial lainnya, dalam rangka penanggulangan bencana. Adapun kegiatan pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana (pelatihan evacuation, SAR, P3K, dapur umum dan lain sebagainya).
- b. Mengefisiensikan forum komunikasi yang ada.
- c. Memberdayakan serta memfasilitasi lembaga kemasyarakatan yang ada (Lembaga agama, adat, dan sosial lainnya).

8. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Tujuan program ini untuk memulihkan fungsi sosial, memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para korban bencana alam, termasuk bagi lanjut usia terlantar, penyandang cacat, dan anak terlantar, untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain:

- Dukungan terhadap *trauma centre* yang ada

9. Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pelembagaan fungsi-fungsi dan hubungan antara lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, lembaga politik lainnya, dalam rangka penyiapan pimpinan daerah dan legislatif daerah di Aceh. Kegiatan pokoknya adalah:

- Dukungan terhadap penataan/penyiapan pimpinan daerah dan legislatif daerah (termasuk tata cara penyusunan pengelolaan keuangan daerah)

10. Program Pengelolaan Pertanahan

Bencana tsunami telah mengakibatkan adanya perubahan batas administrasi wilayah desa/kecamatan/kabupaten/kota. Berdasarkan hal tersebut, maka program ini bertujuan untuk menata penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan, dan berkelanjutan yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan kepentingan rakyat. Adapun kegiatan pokoknya adalah:

- Penataan batas-batas administratif wilayah Aceh yang telah berubah akibat bencana.

11. Program Pengelolaan Sumberdaya Manusia Aparatur

Program ini bertujuan menyediakan aparatur pemerintah pusat untuk instansi vertikal di Aceh dalam melaksanakan pemerintahan umum. Kegiatan pokok pada program ini adalah:

- Fasilitasi penyediaan aparat pemerintah pusat untuk instansi vertikal di Aceh dan proses mutasinya.

5.2. Detail Rencana Program dan Kegiatan

Detail rencana rehabilitasi dan rekonstruksi ini terbagi dalam 2 kelompok berdasarkan batas administrasi wilayah dan lintas daerah. Program dan kegiatan per kabupaten merupakan kegiatan yang bersifat pembangunan fisik sarana dan prasarana perkantoran, seperti:

1. Penyediaan sarana kantor pemerintah, pembangunan kantor darurat serta penyusunan masterplan rencana rehabilitasi kantor dan penyusunan rencana teknis bangunan.

2. Pembangunan kantor sesuai dengan rencana teknis bangunan.
3. Penyediaan sarana dan kantor sistem informasi pelayanan masyarakat (media centre)
4. Penyediaan sarana dan prasarana berupa bale sebagai tempat musyawarah bagi masyarakat/lembaga agama, adat, dan sosial lainnya.

Sedangkan kegiatan-kegiatan lintas kabupaten, merupakan kegiatan yang sifatnya pendataan, penataan, fasilitasi, pemberdayaan, pelatihan, dan lain sebagainya. Secara lebih detail, program dan kegiatan per kabupaten dan lintas kabupaten dan tahapannya dapat dilihat lampiran A1, A2, dan A3.

5.3. Kebutuhan Biaya dan Produk yang Dihasilkan

Untuk melaksanakan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kelembagaan pemerintahan daerah, maka anggaran total yang dibutuhkan adalah sebesar Rp659,2 miliar. Secara detail, rincian tersebut dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini. Sedangkan rencana produk yang akan dihasilkan dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 3
Rekapitulasi Kebutuhan Biaya Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

No.	BIDANG	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah	Total
1	Kegiatan per kabupaten			
a	Rehabilitasi kantor, pembangunan kantor, penyediaan sarana dan prasarana kerja, penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana, serta penyediaan sarana media centre dan forum komunikasi	12,6 M	208,9 M	221,5 M
b	Pembangunan meunasah dan/atau bale	-	60,4 M	60,4 M
	Jumlah Nomor (1)	12,6 M	269,3 M	281,9 M
2	Kegiatan lintas kabupaten			
a	Aparatur pemerintah daerah	11 M	30 M	41 M
b	Kelembagaan dan keuangan daerah	44 M	124,8 M	168,8 M
c	Kerjasama antar daerah	4 M	10 M	14 M
d	Harmonisasi perundang-undangan	4,5 M	2 M	6,5 M
e	Pendataan penduduk	14 M	60 M	74 M
f	Pemberdayaan masyarakat	9 M	30 M	39 M
g	Pendataan dan penataan batas wilayah administrasi baru	5 M	15 M	20 M
h	Pemilihan pemimpin daerah yang baru	6 M	4,5 M	10,5 M
i	Penyediaan aparatur pada instansi vertikal	3,5 M	0 M	3,5 M
	Jumlah Nomor (2)	101 M	276,3 M	377,3 M
	TOTAL	113,6 M	545,6 M	659,2 M

Tabel 4
Rencana Produk Kelompok Kerja Kelembagaan dan
Institusi/Lembaga yang Berwenang

No	Produk	Institusi yg Berwenang	Mitra Kerja di Daerah
1	Rencana penataan, pemberdayaan, serta fasilitasi lembaga-lembaga agama, adat, dan sosial lainnya di Aceh (a.l. lembaga tingkat mukim dan gampong) dalam proses partisipasi dan implemntasi program-program pembangunan	Depdagri	Leading : Sekretaris Daerah, Kepala Mukim, Kepala Gampong Pemimpin Dayah
2	Rencana pengelolaan SDM Aparatur Pemda yang ada, yang meninggal dan hilang (mutasi, promosi, penyelesaian masalah keuangan seperti : gaji, tunjangan pensiun dan kematian, dll) dan rencana kebutuhan SDM Aparatur Pemda (<i>recruitment</i>).	Leading : Depdagri MenPAN, BKN	Leading : Sekda, Bappeda, BKD
3	Rencana perbaikan sistem dan prosedur pasca bencana bagi PNS dan dukungan trauma bagi PNS serta keluarganya	Leading: Menpan, Depdagri	Leading : Sekda, Bappeda, BKD,
4	Rencana penguatan aparatur daerah dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah	Leading: Depdagri Bappenas	Leading : Bappeda Sekda
5	Rencana penataan kelembagaan berdasarkan PP No. 8 Tahun 2003 atau perbaikannya dan memperhatikan <i>rightsizing</i> .	Leading: MenPAN LAN, Depdagri	Leading: Sekda, Bappeda, BKD,
6	Rencana perbaikan sistem dan prosedur kerja lembaga pemerintah daerah	Leading: MenPAN LAN, Depdagri	Leading: Sekda, Bappeda, BKD,
7	Rencana kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan sesuai perubahan administrasi wilayah dan tata ruang wilayah (Rencana teknis (DED) bangunan kantor pemerintahan)	Leading: Depdagri BPN, Dep. PU	Leading: Sekda, Dinas PU, Dinas terkait lainnya, Bappeda,
8	Rencana Pendataan Penduduk Berdasarkan komposisinya utk kebutuhan analisa aparatur dan kelembagaan	Depdagri	Leading : Dinas Kependudukan/ Instansi yang berwenang, Bappeda, Sekda
9	Rencana peningkatan kapasitas/kemampuan Pemda dan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran dan dalam menghadapi masalah pasca bencana.	Depdagri	Leading : Sekda Satkorlak PBP, Dinas Tantib, Bappeda
10	Rencana identifikasi dukungan kerjasama antar pemerintah daerah dan peningkatan kerjasama antar daerah melalui forum kerjasama antar daerah	Leading: Depdagri Bappenas	Leading: Bappeda Sekda, DPRD dan dinas terkait
11	Rencana system komunikasi dan kehumasan daerah (<i>media centre</i>)	Depdagri	Sekda
12	Analisa harmonisasi peraturan perundang-undangan	Depdagri	Leading: Sekda Bappeda, DPRD dan dinas terkait
13	Rencana penataan/peningkatan kapasitas pimpinan daerah dan legislatif daerah	Depdagri	Leading : Sekda, DPRD

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

**LAMPIRAN A –
Detail Rinci Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Kelembagaan Pemerintah Daerah**

Tabel A1
Tahapan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemerintahan Daerah di Aceh

No	Bidang	Kegiatan Pokok														
		Tanggap Darurat		Rehabilitasi						Rekonstruksi						Total Biaya (juta Rp)
				2005		2006		2007		2008		2009				
		NO	Keg.	No	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)		
A	Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan	1	Pembersihan, perbaikan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pemerintahan.	1	Penyediaan pembangunan kantor darurat (kabupaten/kecamatan, mukim dan gampong) serta penyusunan master-plan rencana rehabilitasi kantor (1 provinsi dan 12 kabupaten/kota)	11.500	Kelanjutan penyusunan master-plan rencana rehabilitasi kantor, termasuk didalamnya penyusunan rencana teknis bangunan	12.010	Pembangunan kantor sesuai dengan rencana	20.000	Pembangunan kantor sesuai dengan rencana	20.000	Pembangunan kantor sesuai dengan rencana	20.000	123.510	
					Rehabilitasi untuk kantor rusak ringan		20.000	Rehabilitasi untuk kantor rusak ringan	20.000							
				2	Melengkapi sarana untuk mengisi infrastruktur pemerintah	5.000	Melengkapi sarana untuk mengisi infrastruktur pemerintah	10.500	Melengkapi sarana untuk mengisi infrastruktur pemerintah	10.000	Melengkapi sarana untuk mengisi infrastruktur pemerintah	10.000	Melengkapi sarana untuk mengisi infrastruktur pemerintah	10.000	Melengkapi sarana untuk mengisi infrastruktur pemerintah	10.000

No	Bidang	Kegiatan Pokok														Total Biaya (juta Rp)	
		Tanggap Darurat		Rehabilitasi						Rekonstruksi							
		2005			2006			2007			2008			2009			
		NO	Keg.	No	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)			
				3			Dukung-an Pemerin-tah dalam penyediaan peralatan pema-dam kebaka-ran, ambulan, dan peralatan mana-jemen bencana	10.000	Dukung-an Pemerin-tah dalam penyediaan perala-tan pema-dam kebakaran, ambu-lan, dan perala-tan manajemen bencana	10.000	Duku-ngan Pemerin-tah dalam penyedia-an peralatan pemadam kebaka-ran,ambulan, dan peralatan manaje-men bencana	10.000	Dukung-an Pemerin-tah dalam penyediaan peralatan pema-dam kebaka-ran, ambulan, dan peralatan manaje-men bencana	10.000	40.000		
				4	Penyediaan sarana dan prasarana berupa bale sebagai tempat bermusyawarah bagi masyarakat/lembaga agama, adat, dan sosial lainnya	20.000	Penyediaan sarana dan prasarana berupa bale sebagai tempat bermusyawarah bagi masyarakat/ lembaga agama, adat, dan sosial lainnya	10.000	Penyediaan sarana dan prasarana berupa bale sebagai tempat bermusyawarah bagi masyarakat/ lembaga agama, adat, dan sosial lainnya	10.000	Penyedia-an sarana dan prasarana berupa bale sebagai tempat bermusyawarah bagi masyarakat/ lembaga agama, adat, dan sosial lainnya	10.000	Penyediaan sarana dan prasarana berupa bale sebagai tempat bermusyawarah bagi masyarakat/ lembaga agama, adat, dan sosial lainnya	10.400	60.400		

No	Bidang	Kegiatan Pokok														Total Biaya (juta Rp)
		Tanggap Darurat		Rehabilitasi						Rekonstruksi						
		2005				2006		2007		2008		2009				
		NO	Keg.	No	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)		
				5	Penataan sistem komunikasi dan kehumasan daerah	2.500	Pemantapan sistem komunikasi dan kehumasan daerah	2.500	Pemantapan sistem komunikasi dan kehumasan daerah	2.500	Pemantapan sistem komunikasi dan kehumasan daerah	2.500	Pemantapan sistem komunikasi dan kehumasan daerah	2.500	12.500	
			TOTAL A 2005			42.500	TOTAL A 2006	65.510	TOTAL A 2007	71.500	TOTAL A 2008	51.400	TOTAL A 2009	51.000	281.900	
			TOTAL A												282.900	
B	Sumber-daya aparatur	1		1	Fasilitasi aparatur pemerintah daerah dalam proses penyusunan rencana daerah, pengelolaan keuangan daerah.	2.000	Pemberdayaan aparatur pemerintah daerah dalam proses penyusunan rencana daerah, pengelolaan keuangan daerah.	0.250	Pemberdayaan aparatur pemerintah daerah dalam proses penyusunan rencana daerah, pengelolaan keuangan daerah.	0.250	Pemberdayaan aparatur pemerintah daerah dalam proses penyusunan rencana daerah, pengelolaan keuangan daerah.	0.250	Pemberdayaan aparatur pemerintah daerah dalam proses penyusunan rencana daerah, pengelolaan keuangan daerah.	0.250	3.000	

No	Bidang	Kegiatan Pokok													Total Biaya (juta Rp)
		Tanggap Darurat		Rehabilitasi						Rekonstruksi					
		2005			2006			2007		2008		2009			
		NO	Keg.	No	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)	
		2	Penanganan masalah administrasi kepegawaian (gaji, tunjangan, asuransi, dsb) dan bantuan dukung-an trauma bagi PNS dan keluarganya	2	Penanganan lanjutan masalah administrasi kepegawaian (gaji, tunjangan, asuransi, dsb) dan bantuan dukung-an trauma bagi PNS dan keluarganya	4.000	Penanganan lanjutan masalah administrasi kepegawaian (gaji, tunjangan, asuransi, dsb) dan bantuan dukung-an trauma bagi PNS dan keluarganya	0.500							4.500
							Penyusunan sistem dan prosedur paska bencana bagi PNS dan keluarganya	1.000	Penetapan sistem dan prose-dur paska bencana bagi PNS dan keluarganya	0.500					1.500
		3	Pendata-an ketersediaan aparatur pemerin-tah daerah	3	Penyediaan tenaga-tenaga kontrak/suplemen	10.000									10.000

No	Bidang	Kegiatan Pokok													Total Biaya (juta Rp)	
		Tanggap Darurat		Rehabilitasi						Rekonstruksi						
		2005			2006		2007		2008		2009					
		NO	Keg.	No	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)		
					Penyelesaian recruit-men CPNS yang telah dilaksanakan	1.000	Penyedi-aan (melalui rekrut-men dan mutasi) aparatur pemerin-tah daerah sesuai dengan perubahan jumlah pendu-duk yang dilayani	1.000								2.000
					Penyusu-nan rencana pengelolaan (penataan dan pemberda-yaan) kepegawaian untuk 1 provinsi, dan 12 kabupa-ten/ kota	14.000										14.000

No	Bidang	Kegiatan Pokok															
		Tanggap Darurat		Rehabilitasi						Rekonstruksi						Total Biaya (juta Rp)	
		2005			2006			2007			2008			2009			
		NO	Keg.	No	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)			
				4	Peningkatan kapasitas Pemerin-tah Daerah dalam usaha mitigasi bencana	6.000									6.000		
			TOTAL B 2005			37.000	TOTAL B 2006	2.750	TOTAL B 2007	0.750	TOTAL B 2008	0.250	TOTAL B 2009	0.250	41.000		
			TOTAL B														41.000
C	Kelemba-gaan Pemda	1	Pendataan kelemba-gaan eksisting dan penyelamatan adminis-tratif pemerintahan	1	Penyusunan rencana penataan organisa-si pemerinta-han daerah	6.000	Pemantapan kelemba-gaan pemerin-tah daerah sesuai dengan peruba-han jumlah penduduk dan pemba-ngunan daerah	9.000	Pemantapan kelembagaan pemerintah daerah sesuai dengan peruba-han jumlah pendu-duk dan pembangunan daerah	9.000	Monito-ring dan evaluasi perang-kat daerah	9.000	Monitoring dan evaluasi perang-kat daerah	9.000	45.500		
					Penyelamatan administratif pemerin-tahan	3.500											

No	Bidang	Kegiatan Pokok															
		Tanggap Darurat		Rehabilitasi						Rekonstruksi						Total Biaya (juta Rp)	
		2005			2006			2007			2008			2009			
		NO	Keg.	No	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)			
		2	Mobilisasi aparaturnya pusat dalam operasionalisasi penyelenggaraan pemerintahan	2	Bantuan untuk operasionalisasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan/ desa	13.000	Bantuan untuk operasionalisasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan/desa	13.000	Peningkatan kapasitas pemerintahan mukim/kecamatan/ desa	14.000	Peningkatan kapasitas pemerintahan mukim/kecamatan/ desa	14.000	Peningkatan kapasitas pemerintahan mukim/kecamatan/ desa	14.000	78.500		
					Penataan dan peningkatan kapasitas pemerintahan kecamatan/ mukim/ gampong	4.500	Penataan dan peningkatan kapasitas pemerintahan kecamatan/ mukim/ gampong	6.000									
				4			Penyusunan rencana perbaikan sistem dan prosedur kerja lembaga pemerintah	4.200	Sosialisasi dan penerapan sistem dan prosedur kerja lembaga pemerintah	4.200	Sosialisasi dan pelaksanaan sistem dan prosedur kerja lembaga pemerintah	4.200	Sosialisasi dan pelaksanaan sistem dan prosedur kerja lembaga pemerintah	4.200	16.800		

No	Bidang	Kegiatan Pokok																					
		Tanggap Darurat		Rehabilitasi						Rekonstruksi						Total Biaya (juta Rp)							
		2005			2006			2007			2008			2009									
		NO	Keg.	No	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)									
D	Keuangan daerah			1	Peningkatan legislatif daerah dalam penyusunan rencana serta monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah	6.000	Peningkatan legislatif daerah dalam penyusunan rencana serta monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah	3.000	Peningkatan legislatif daerah dalam penyusunan rencana serta monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah	3.000	Peningkatan legislatif daerah dalam penyusunan rencana serta monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah	3.000	Peningkatan legislatif daerah dalam penyusunan rencana serta monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah	3.000	18.000								
				2	Penataan keuangan daerah dan pengelolaannya (monitoring dan evaluasi)	6.000	Rencana pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaannya (monitoring dan evaluasi)	1.000	Rencana pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaannya (monitoring dan evaluasi)	1.000	Rencana pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaannya (monitoring dan evaluasi)	1.000	Rencana pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaannya (monitoring dan evaluasi)	1.000	10.000								
			TOTAL C+D 2005			39.000	TOTAL C+D 2006			36.200	TOTAL C+D 2007			31.200	TOTAL C+D 2008			31.200	TOTAL C+D 2009			31.200	168.800
			TOTAL C DAN D														168.800						

No	Bidang	Kegiatan Pokok															
		Tanggap Darurat		Rehabilitasi						Rekonstruksi						Total Biaya (juta Rp)	
		2005			2006			2007			2008			2009			
		NO	Keg.	No	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)			
E	Kerjasama antar daerah	1	Kerjasama antar daerah dalam pemberian bantuan keuangan, bantuan medis, dan peralatan lain	1	Kerjasama antar daerah dalam pemberian bantuan keuangan, bantuan medis, dan peralatan lain	2.500	Optimalisasi jaringan kerjasama antar pemerintah daerah kabupaten/kota dan antar provinsi (dalam bentuk forum kerjasama)	2.500	Optimalisasi jaringan kerjasama antar pemerintah daerah kabupaten/ kota dan antar provinsi (dalam bentuk forum kerjasama)	1.500	Optimalisasi jaringan kerjasama antar pemerintah daerah kabupaten/ kota dan antar provinsi (dalam bentuk forum kerjasama)	1.000	Optimalisasi jaringan kerjasama antar pemerintah daerah kabupaten/ kota dan antar provinsi (dalam bentuk forum kerjasama)	1.000	8.500		
				2	Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah	3.500	Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah	0.500	Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah	0.500	Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah	0.500	Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah	0.500	5.500		
			TOTAL E 2005			6.000	TOTAL E 2006	3.000	TOTAL E 2007	2.000	TOTAL E 2008	1.500	TOTAL E 2009	1.500	14.000		
			TOTAL E													14.000	

No	Bidang	Kegiatan Pokok														
		Tanggap Darurat		Rehabilitasi						Rekonstruksi						Total Biaya (juta Rp)
		2005					2006		2007		2008		2009			
		NO	Keg.	No	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)		
F	Administrasi data kependudukan	1	Penyelamatan data kependudukan.	1	Penyelamatan data kependudukan dan pendataan jumlah penduduk.	13.000	Penataan dan analisis kependudukan.	31.000	Penataan dan analisis kependudukan	30.000					74.000	
			TOTAL F 2005			13.000	TOTAL F 2006	31.000	TOTAL F 2007	30.000					74.000	
			TOTAL F												74.000	
G	Administrasi wilayah pemerintahan	1	Pendataan batas-batas wilayah administrasi pemerintahan kabupaten, kecamatan dan desa	1	Pendataan dan penataan batas-batas wilayah administrasi pemerintahan kabupaten, kecamatan dan desa	4.000	Penataan lanjutan batas-batas administratif wilayah Aceh yang telah berubah akibat bencana	8.000	Penataan lanjutan batas-batas administratif wilayah Aceh yang telah berubah akibat bencana	8.000					20.000	
			TOTAL G 2005			4.000	TOTAL G 2006	8.000	TOTAL G 2007	8.000					20.000	
			TOTAL G												20.000	
H	Pemberdayaan Masyarakat	1	Dukungan terhadap trauma center yang ada.	1	Dukungan terhadap trauma center	7.500	Dukungan terhadap trauma center yang ada.	1.000	Dukungan terhadap trauma center yang ada.	1.000	Dukungan terhadap trauma center yang ada.	1.000	Dukungan terhadap trauma center yang ada.	1.000	11.500	

No	Bidang	Kegiatan Pokok															
		Tanggap Darurat		Rehabilitasi						Rekonstruksi						Total Biaya (juta Rp)	
		2005			2006			2007			2008			2009			
		NO	Keg.	No	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)			
				3			Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana (pelatihan evakuasi, SAR, P3K, dll).	1.500		Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana (pelatihan evakuasi, SAR, P3K, dll).	1.500		Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana (pelatihan evakuasi, SAR, P3K, dll).	1.500			4.500
				4	Memberdayakan lembaga agama, adat, dan sosial lainnya yang telah ada (a.l tuha peut dan sebagainya)	6.000	Menguatkan dan memfasilitasi lembaga agama, adat, dan sosial lainnya yang telah ada (a.l tuha peut dan sebagainya)	1.500		Menguatkan dan memfasilitasi lembaga agama, adat, dan sosial lainnya yang telah ada (a.l tuha peut dan sebagainya)	1.500		Menguatkan dan memfasilitasi lembaga agama, adat, dan sosial lainnya yang telah ada (a.l tuha peut dan sebagainya)	1.500	1.500	12.000	
		5	Membentuk forum komunikasi dan koordinasi dengan seluruh stakeholder	5	Mengefisienkan forum komunikasi yang ada.	3.500	Mengefisienkan forum komunikasi yang ada.	2.000		Mengefisienkan forum komunikasi yang ada.	2.000		Mengefisienkan forum komunikasi yang ada.	2.000	1.500	11.000	

No	Bidang	Kegiatan Pokok													Total Biaya (juta Rp)
		Tanggap Darurat		Rehabilitasi						Rekonstruksi					
		2005					2006		2007		2008		2009		
		NO	Keg.	No	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)	
			dalam kerjasama bantuan.												
			TOTAL H 2005			13.500	TOTAL H 2006	4.000	TOTAL H 2007	4.000	TOTAL H 2008	4.000	TOTAL H 2009	2.500	39.000
			TOTAL H											39.000	
I	Pimpinan Daerah dan Anggota legislatif	1	Pendataan pimpinan daerah dan anggota legislatif yang telah meninggal dunia	1	Dukungan terhadap penataan/penyipan dan penyediaan pimpinan daerah dan anggota legislatif	10.500									10.500
			TOTAL I 2005			10.500									10.500
			TOTAL I											10.500	
J	Kebijakan perundangan	1	Harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terdapat di Aceh	1	Harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terdapat di Aceh	6.500									6.500
			TOTAL J 2005			6.500									6.500

No	Bidang	Kegiatan Pokok													Total Biaya (juta Rp)	
		Tanggap Darurat		Rehabilitasi						Rekonstruksi						
		2005			2006		2007		2008		2009					
		NO	Keg.	No	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)	Keg.	Biaya (juta Rp)		
														TOTAL I	6.500	
K	Aparatur Pusat		Penyediaan aparatur pada instansi vertikal		Penyediaan aparatur pada instansi vertikal	3.500									3.500	
			TOTAL K 2005			3.500									3.500	
														TOTAL I	3.500	
			TOTAL 2005			173.500	TOTAL 2006	154.450	TOTAL 2007	149.950	TOTAL 2008	90.850	TOTAL 2009	90.450	659.200	
			TOTAL SELURUH SEKTOR KELEMBAGAAN													659.200

Tabel A2
Rencana Program dan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sistem Kelembagaan Lintas Daerah

No	Nama Program	Nama Kegiatan	Sasaran	Kelompok sasaran	Cakupan kegiatan	Indikator keberhasilan	Jadwal waktu pelaksanaan	Keterkaitan dengan program lain	Instansi pelaksana	Perkiraan biaya	Sumber pembiayaan
1	Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah	1. Pemberdayaan dan fasilitasi aparat untuk menjalankan fungsi pemerintahan (proses penyusunan rencana keuangan daerah) dan pelayanan umum serta mempersiapkan kapasitas untuk operasionalisasi dan implementasi rencana	Meningkatnya kapasitas aparatur dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan masyarakat.	Aparat Pemerintah Daerah	Pemberdayaan dan fasilitasi aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pemberdayaan aparatur daerah • Tersusunnya rencana daerah • Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah 	2005 – 2009		Dep Dalam Negeri, Bappenas, Sekda Pmrnth Prov, Sekda Pmrnth Kab/Kota	3 M	APBN dan APBD
		2. Penyiapan rencana perbaikan sistim dan prosedur pasca bencana alam dan bencana buatan bagi PNS dan keluarganya dalam rangka mengatasi trauma bagi PNS.	Tersusunnya perbaikan sistem dan prosedur paska bencana alam dan bencana buatan bagi PNS dan keluarganya. (sistem dan prosedur tunjangan bagi PNS dan keluarganya)	Aparat Pemerintah Daerah	Penyusunan peraturan perbaikan sistem dan prosedur	Tersusunnya suatu sistem dan prosedur penggantian hak waris, uang duka, dan tunjangan untuk PNS yang meninggal dan keluarga yang ditinggalkan, PNS yang mengalami cacat akibat bencana, PNS yang kehilangan sebagian besar	2006 – 2007		Dep Dalam Negeri, MenPAN, BKD, Sekda Pmrnth Prov	1,5 M	APBN dan APBD

No	Nama Program	Nama Kegiatan	Sasaran	Kelompok sasaran	Cakupan kegiatan	Indikator keberhasilan	Jadwal waktu pelaksanaan	Keterkaitan dengan program lain	Instansi pelaksana	Perkiraan biaya	Sumber pembiayaan
						harta benda, serta keluarga, serta terlaksananya bantuan dukungan trauma					
		3. Penanganan masalah administrasi kepegawaian (gaji, tunjangan, asuransi, dsb) dan dukungan trauma bagi PNS dan keluarganya	Terselesaikannya masalah administrasi kepegawaian (gaji, tunjangan, asuransi, dsb)	Aparat Pemerintah Daerah	Pembayaran masalah administrasi kepegawaian	Terbayarnya gaji, tunjangan, asuransi bagi PNS Aceh	2005 - 2006		Menpan Sekretariat kabupaten/kota	4,5 M	APBN dan APBD
		4. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam usaha mitigasi bencana.	Meningkatnya kapasitas dalam usaha penyiapan rencana mitigasi bencana (SAR, evakuasi, P3K, Dapur Umum)	Aparat Pemerintah Daerah	Pelatihan mitigasi bencana (SAR, evakuasi, P3K, Dapur Umum)	Terciptanya PNS yang kompeten dalam kegiatan mitigasi bencana seperti SAR, evakuasi, P3K, dan pengelolaan dapur umum.	2005		Dep Dalam Negeri, Satkorlak/Satlak (10 kab/kota)	6 M	APBN dan APBD

No	Nama Program	Nama Kegiatan	Sasaran	Kelompok sasaran	Cakupan kegiatan	Indikator keberhasilan	Jadwal waktu pelaksanaan	Keterkaitan dengan program lain	Instansi pelaksana	Perkiraan biaya	Sumber pembiayaan
		(i) Penyediaan tenaga-tenaga kontrak/suplemen, (ii) penyelesaian rekrutmen CPNS yang telah dilaksanakan, (iii) penataan dan penyediaan (melalui rekrutmen dan mutasi) aparatur pemerintah daerah sesuai dengan perubahan jumlah penduduk yang dilayani dan rencana pengelolaannya	Tersedianya aparat pemerintah daerah melalui rekrutmen pegawai baru atau mutasi antar daerah sesuai dengan kebutuhan penduduk yang dilayani	Aparat Pemerintah Daerah	Pendataan aparatur, penyusunan rencana kebutuhan, rekrutmen dan mutasi aparatur	Terpenuhinya sejumlah aparatur pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan penduduk yang harus dilayani	2005-2006		Dep Dalam Negeri, BKN, BKD, Sekda Pmrnth Prov, Sekda Pmrnth Kab/Kota Bappeda	26 M	APBN dan APBD
2	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.	1. Penataan kelembagaan pemerintah daerah sesuai dengan perubahan jumlah penduduk dan pembangunan daerah.	Tertatanya kelembagaan pemerintahan daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) sesuai dengan kebutuhan jumlah penduduk yang dilayani.	Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Penataan lembaga pemerintah daerah	Tertatanya kelembagaan pemerintahan daerah untuk 1 Provinsi dan 12 Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan jumlah penduduk yang dilayani dan kebutuhan pembangunan daerah	2005-2009		Dep Dalam Negeri, MenPAN, LAN, BKD, Sekda, Bappeda	49.6 M	APBN dan APBD

No	Nama Program	Nama Kegiatan	Sasaran	Kelompok sasaran	Cakupan kegiatan	Indikator keberhasilan	Jadwal waktu pelaksanaan	Keterkaitan dengan program lain	Instansi pelaksana	Perkiraan biaya	Sumber pembiayaan
		2. Bantuan operasionalisasi penyelenggaraan dan peningkatan pemerintah tingkat kecamatan/mukim / gampong	Terlaksananya proses partisipasi masyarakat/Lembaga agama, adat dan sosial lainnya (a.l. Tuha Peut, dll) dalam proses penyusunan rencana dan penganggaran pada tingkat kecamatan/desa/ gampong dan mukim	Lembaga agama, adat, dan sosial lainnya	Peningkatan kapasitas	Teridentifikasinya lembaga agama, adat, dan sosial lainnya yang masih eksis, serta tersusunnya petunjuk pelaksanaan bagi tiap lembaga untuk berpartisipasi dalam program pembangunan daerah serta terlaksananya peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan/mukim/gampong	2005-2006		Dep Dalam Negeri, Sekda, Bappeda Prop/Kab/Kota, lembaga kemasyarakatan	78,5 M	APBN dan APBD
		3. Penyusunan rencana perbaikan sistem dan prosedur kerja lembaga pemerintah daerah dan sosialisasinya serta pelaksanaan sistem dan prosedur	Tersedianya rencana perbaikan sistem dan prosedur kerja lembaga pemerintah daerah sehingga dapat berjalan	Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Penyusunan peraturan sistem dan prosedur	Tersusunnya suatu sistem dan prosedur kerja lembaga pemerintah daerah dan sosialisasinya serta pelaksanaan sistem dan	2006-2009		Dep Dalam Negeri, MenPAN, LAN, BKD, Sekda, Bappeda	16,8 M	APBN dan APBD

No	Nama Program	Nama Kegiatan	Sasaran	Kelompok sasaran	Cakupan kegiatan	Indikator keberhasilan	Jadwal waktu pelaksanaan	Keterkaitan dengan program lain	Instansi pelaksana	Perkiraan biaya	Sumber pembiayaan
			secara efektif dan efisien dan sosialisasinya serta pelaksanaan sistem dan prosedur.			prosedur					
3	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah.	Peningkatan kapasitas legislatif daerah dalam penyusunan rencana dan monitoring pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya kapasitas legislatif daerah dalam penyusunan rencana dan monitoring pengelolaan keuangan daerah	Legislatif daerah	Pelatihan kapasitas bagi legislatif daerah	Terciptanya legislatif yang kompeten dalam menyusun rencana dan monitoring pengelolaan keuangan daerah	2005-2009		Dep Dalam Negeri, Bappenas, Sekda, Bappeda	18 M	APBN dan APBD
		Penataan keuangan daerah dan pengelolaannya (monitoring dan evaluasi)	Tertatanya keuangan daerah serta terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi	Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Penataan keuangan daerah serta monitoring dan evaluasi	Tersusunnya dokumen rencana keuangan daerah serta terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi	2005 - 2009		Dep. Dalam Negeri, Sekda, Provinsi/ Kabupaten/ Kota	10 M	APBN dan APBD
4	Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah	Optimalisasi jaringan kerjasama antar pemerintah daerah kabupaten/kota dan	Terciptanya forum kerjasama dan tersedianya	Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Penataan forum kerjasama antar	Teridentifikasinya forum kerjasama yang dapat dibentuk	2005-2009		Dep Dalam Negeri, Bappenas, Pemda	14 M	APBN dan APBD

No	Nama Program	Nama Kegiatan	Sasaran	Kelompok sasaran	Cakupan kegiatan	Indikator keberhasilan	Jadwal waktu pelaksanaan	Keterkaitan dengan program lain	Instansi pelaksana	Perkiraan biaya	Sumber pembiayaan
		antar provinsi (dalam bentuk forum kerjasama)	sarana utk kerjasama antar daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) dlm tahap rekonstruksi dan rehabilitasi.		pemerintah daerah	(identifikasi daerah, identifikasi bidang kerjasama),			Provinsi, Sekda, Bappeda, Dinas terkait		
		Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah	Tertaatnya penyelenggaraan pemerintahan yang dapat berjalan secara berkesinambungan antara pemerintah pusat dan daerah	Pemerintah pusat, pemerintah provinsi/kab/kota	Koordinasi kegiatan	Terciptanya mekanisme koordinasi kegiatan pembangunan yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah	2005 - 2009		Dep. Dalam Negeri, pemda Provinsi, Pemda Kabupaten/Kota	5,5 M	APBN dan APBD
5	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Harmonisasi peraturan perundang-undangan yg terdapat di Aceh	Tertatannya perundang-undangan yang berlaku di Aceh secara selaras dan harmonis	Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota	Penataan peraturan perundang-undangan	Tertatannya sistem dan mekanisme kerja (Darsip, Otsus, Mahkamah Syariah) secara selaras dan harmonis	2005		Dep Dalam Negeri, Pemda Provinsi, Sekda, Bappeda, Dinas terkait	6,5 M	APBN dan APBD

No	Nama Program	Nama Kegiatan	Sasaran	Kelompok sasaran	Cakupan kegiatan	Indikator keberhasilan	Jadwal waktu pelaksanaan	Keterkaitan dengan program lain	Instansi pelaksana	Perkiraan biaya	Sumber pembiayaan
6	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Pendataan penduduk	Terdatanya penduduk yang meninggal dunia, hilang maupun selamat serta terdatanya struktur kependudukan	Masyarakat provinsi/kabupaten/ kota	Pendataan penduduk	Terdatanya jumlah penduduk menurut komposisi umur sebagai input bagi perumusan penataan aparatur pemerintah daerah.	2005 - 2007		Dep Dalam Negeri, Dinas kependudukan, Bappeda, Sekda	74 M	APBN dan APBD
7	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dukungan terhadap trauma center yang ada	Terlaksananya recovery trauma sosial masyarakat	Trauma centre eksisting	Pemulihan trauma masyarakat	Terciptanya masyarakat yang siap untuk dilibatkan dalam pelaksanaan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi	2005-2009		Dep Dalam Negeri, Satkorlak PBP, Dinas terkait	11,5 M	APBN dan APBD
8	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana (pelatihan evacuation, SAR, P3K, dll)	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam merehabilitasi dan merekonstruksi pembangunan di Aceh	Masyarakat provinsi/ kabupaten /kota	Pemberdayaan masyarakat	Terciptanya masyarakat yang tanggap dalam usaha mitigasi bencana (pelatihan evacuation, SAR, P3K, dll)	2006-2008		Dep Dalam Negeri, Satkorlak PBP, Dinas terkait	3 M	APBN dan APBD

No	Nama Program	Nama Kegiatan	Sasaran	Kelompok sasaran	Cakupan kegiatan	Indikator keberhasilan	Jadwal waktu pelaksanaan	Keterkaitan dengan program lain	Instansi pelaksana	Perkiraan biaya	Sumber pembiayaan
		Penguatan dan faslitasi lembaga agama,adat dan sosial lainnya pada tingkat mukim /gampong yang ada	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya pemberdayaan/partisipasi lembaga agama, adat, dan sosial lainnya dalam partisipasi proses perencanaan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan di Aceh - Terbentuknya forum komunikasi masyarakat 	Lembaga Kemasyarakan	Pemberdayaan lembaga kemasyarakan	Terlibatkannya masyarakat dalam proses perencanaan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan di Aceh	2005-2009		Dep Dalam Negeri, Satkorlak PBP, Dinas terkait	27.5 M	APBN dan APBD

No	Nama Program	Nama Kegiatan	Sasaran	Kelompok sasaran	Cakupan kegiatan	Indikator keberhasilan	Jadwal waktu pelaksanaan	Keterkaitan dengan program lain	Instansi pelaksana	Perkiraan biaya	Sumber pembiayaan
9	Program pengelolaan Pertanahan	Penataan batas-batas administrasi wilayah Aceh yang telah berubah akibat bencana	Tertatanya batas-batas administrasi wilayah provinsi/kecamatan/kelurahan yang baru	Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Pendataan, penataan dan penetapan batas wilayah administrasi wilayah yang baru	Penetapan batas administrasi wilayah yang diatur dalam qanun	2005-2007		BPN	20 M	APBN dan APBD
10	Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi.	Dukungan terhadap penataan/penyiapan pimpinan daerah dan legislatif daerah (termasuk tata cara penyusunan pengelolaan keuangan daerah).	Tersedianya dan terpilihnya pimpinan daerah dan legislatif baru untuk menggantikan yang meninggal dan habis masa jabatannya	Pimpinan daerah dan dewan legislatif daerah	Penataan/penyiapan pimpinan daerah dan legislatif daerah	Terisinya posisi pimpinan daerah dan legislatif yang baru	2005		Dep Dalam Negeri, BKN, MenPAN, Sekda, BKD, DPRD	10.5 M	APBN dan APBD
11	Program Pengelolaan Sumberdaya Manusia Aparatur	Fasilitasi penyediaan aparat pemerintah pusat utk instansi vertikal di Aceh dan proses mutasinya	Tersedianya aparatur pada instansi vertikal di Aceh.	Aparat Pemerintah Daerah	Penyediaan aparat instansi vertikal	Tersedianya sejumlah aparatur pada instansi vertikal di Aceh.	2005-2009		Dep Dalam Negeri, MenPAN, BKN	3,5 M	APBN dan APBD

Tabel A3
Program dan Kegiatan Provinsi, Kabupaten dan Kota

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Program	Kegiatan	Sasaran	Kelompok Sasaran	Cakupan Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Waktu	Keterkaitan dengan Program Lain	Instansi Pelaksana	Biaya (Rp miliar)	Sumber Biaya
1	Prov NAD	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah;	Penyediaan sarana dan kantor darurat pada tahap tanggap darurat; penyusunan masterplan dan rencana teknis rehabilitasi kantor; penyediaan bangunan kantor permanen;	Tersedianya sarana pemerintahan, kantor pemerintah dan rencana perbaikan kantor;	Pemda Provinsi	Penyusunan masterplan dan rencana teknis rehabilitasi 1 kantor Gubernur dan 17 kantor dinas/badan provinsi;	Tersusunnya masterplan dan rencana teknis rehabilitasi untuk 1 kantor Gubernur dan 17 kantor dinas/badan provinsi NAD;	2005-2009	Terkait dengan Program infrastruktur, pembangunan fasilitas umum	Dep Dalam Negeri dan Pemda	83.090	APBN, Donor
						Penyediaan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya sarana kantor (cth: bangku, meja, lemari, komputer, printer) dan tersedianya 1 kantor Gubernur dan 17 kantor badan/dinas Provinsi;	2005-2009				

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Program	Kegiatan	Sasaran	Kelompok Sasaran	Cakupan Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Waktu	Keterkaitan dengan Program Lain	Instansi Pelaksana	Biaya (Rp miliar)	Sumber Biaya
						Penyediaan peralatan pemadam kebakaran, ambulan, dan peralatan manajemen bencana	Lengkapya peralatan pemadam kebakaran, ambulan dan peralatan manajemen bencana untuk Prov NAD;	2005-2009				
			Penyediaan sarana dan kantor sistem informasi pelayanan masyarakat (Media Centre)	Tersedianya sarana dan kantor informasi pelayanan masyarakat (Media centre);	Pemda Provinsi dan Masyarakat	Pembangunan kantor sistem informasi dan penyediaan sarana kerja	Tersedianya 1 kantor informasi pelayanan masyarakat	2005-2009				

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Program	Kegiatan	Sasaran	Kelompok Sasaran	Cakupan Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Waktu	Keterkaitan dengan Program Lain	Instansi Pelaksana	Biaya (Rp miliar)	Sumber Biaya
		Program pemberdayaan kelembagaan sosial	Penyediaan sarana dan prasarana berupa bale sebagai tempat musyawarah bagi masyarakat / lembaga agama, adat, dan sosial lainnya (a.l. Tuha Peut, dll)	Tersedianya sarana dan prasarana berupa bale sebagai tempat musyawarah bagi masyarakat/ lembaga agama, adat, dan sosial lainnya (a.l. Tuha Peut, dll).	Masyarakat	Pembangunan sejumlah bale sebagai tempat bermusyawarah.	Terlaksananya proses partisipasi masyarakat	2005-2009				

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Program	Kegiatan	Sasaran	Kelompok Sasaran	Cakupan Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Waktu	Keterkaitan dengan Program Lain	Instansi Pelaksana	Biaya (Rp miliar)	Sumber Biaya
2	Kota Banda Aceh	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah;	Penyediaan sarana dan kantor darurat pada tahap tanggap darurat; penyusunan masterplan dan rencana teknis rehabilitasi kantor; penyediaan bangunan kantor permanen;	Tersedianya sarana pemerintahan, kantor pemerintah dan rencana perbaikan kantor;	Pemerintah Kota	Penyusunan masterplan dan rencana teknis rehabilitasi 1 kantor Walikota, 13 kantor dinas/badan kota, 3 kantor kecamatan dan 43 kantor kelurahan;	Tersusunnya masterplan dan rencana teknis rehabilitasi untuk 1 kantor Walikota dan 14 kantor badan/dinas kota, 3 kantor kecamatan dan 43 kantor kelurahan.	2005- 2009	Terkait dengan Program infrastruktur, pembangunan fasilitas umum	Dep Dalam Negeri dan Pemda	28.800	APBN, Donor
						Penyediaan sarana dan prasarana kantor; penyediaan peralatan pemadam kebakaran, ambulan dan peralatan manajemen bencana	Tersedianya sarana kantor (cth: bangku, meja, lemari, komputer, printer) dan tersedianya 1 kantor Walikota dan 14 kantor badan/dinas kota, 3 kantor kecamatan dan 43 kantor kelurahan; serta peralatan pemadam kebakaran ambulan dan peralatan manajemen bencana	2005- 2009				

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Program	Kegiatan	Sasaran	Kelompok Sasaran	Cakupan Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Waktu	Keterkaitan dengan Program Lain	Instansi Pelaksana	Biaya (Rp miliar)	Sumber Biaya
			Penyediaan sarana dan kantor sistem informasi pelayanan masyarakat (Media Centre)	Tersedianya sarana dan kantor informasi pelayanan masyarakat (Media centre);	Pemerintah Kota dan Masyarakat	Pembangunan kantor sistem informasi dan penyediaan sarana kerja	Tersedianya 1 kantor informasi pelayanan masyarakat	2005-2009				
		Program pemberdayaan kelembagaan sosial	Penyediaan sarana dan prasarana berupa bale sebagai tempat musyawarah bagi masyarakat / lembaga agama, adat, dan sosial lainnya (a.l. Tuha Peut, dll)	Tersedianya sarana dan prasarana berupa bale sebagai tempat musyawarah bagi masyarakat/ lembaga agama, adat, dan sosial lainnya (a.l. Tuha Peut, dll).	Masyarakat	Pembangunan sejumlah bale sebagai tempat bermusyawarah.	Terlaksananya proses partisipasi masyarakat	2005-2009				

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Program	Kegiatan	Sasaran	Kelompok Sasaran	Cakupan Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Waktu	Keterkaitan dengan Program Lain	Instansi Pelaksana	Biaya (Rp miliar)	Sumber Biaya
3	Kabupaten Aceh Besar	Program Peningkatan Kapabilitas Kelembagaan Pemerintah Daerah;	Penyediaan sarana dan kantor darurat pada tahap tanggap darurat ; penyusunan masterplan dan rencana teknis rehabilitasi kantor; penyediaan bangunan kantor permanen;	Tersedianya sarana pemerintahan, kantor pemerintah dan rencana perbaikan kantor;	Pemerintah Kabupaten	Penyusunan masterplan dan rencana teknis rehabilitasi 6 kantor kecamatan dan 103 kantor desa	Tersusunnya masterplan dan rencana teknis rehabilitasi untuk 6 kantor kecamatan dan 103 kantor desa	2005- 2009	Terkait dengan Program infrastruktur, pembangunan fasilitas umum	Dep Dalam Negeri dan Pemda	20.245	APBN, Donor
						Penyediaan sarana dan prasarana kantor; penyediaan peralatan pemadam kebakaran, ambulan dan peralatan manajemen bencana	Tersedianya sarana kantor (cth: bangku, meja, lemari, komputer, printer) dan tersedianya 6 kantor kecamatan dan 103 kantor desa serta peralatan pemadam kebakaran ambulan dan peralatan manajemen bencana	2005- 2009				

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Program	Kegiatan	Sasaran	Kelompok Sasaran	Cakupan Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Waktu	Keterkaitan dengan Program Lain	Instansi Pelaksana	Biaya (Rp miliar)	Sumber Biaya
			Penyediaan sarana dan kantor sistem informasi pelayanan masyarakat (Media Centre)	Tersedianya sarana dan kantor informasi pelayanan masyarakat (Media centre);	Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat	Pembangunan kantor sistem informasi dan penyediaan sarana kerja	Tersedianya 1 kantor informasi pelayanan masyarakat	2005-2009				
		Program pemberdayaan kelembagaan sosial	Penyediaan sarana dan prasarana berupa bale sebagai tempat musyawarah bagi masyarakat / lembaga agama, adat, dan sosial lainnya (a.l. Tuha Peut, dll)	Tersedianya sarana dan prasarana berupa bale sebagai tempat musyawarah bagi masyarakat/ lembaga agama, adat, dan sosial lainnya (a.l. Tuha Peut, dll).	Masyarakat	Pembangunan sejumlah bale sebagai tempat bermusyawarah.	Terlaksananya proses partisipasi masyarakat	2005-2009				

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Program	Kegiatan	Sasaran	Kelompok Sasaran	Cakupan Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Waktu	Keterkaitan dengan Program Lain	Instansi Pelaksana	Biaya (Rp miliar)	Sumber Biaya
4	Kabupaten Aceh Barat	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah;	Penyediaan sarana dan kantor darurat pada tahap tanggap darurat ; penyusunan masterplan dan rencana teknis rehabilitasi kantor; penyediaan bangunan kantor permanen;	Tersedianya sarana pemerintahan, kantor pemerintah dan rencana perbaikan kantor;	Pemerintah Kabupaten	Penyusunan masterplan dan rencana teknis rehabilitasi 22 kantor dinas/ badan, 4 kantor kecamatan dan 36 kantor desa;	Tersusunnya masterplan dan rencana teknis rehabilitasi untuk 22 kantor dinas/badan, 4 kantor kecamatan dan 36 kantor desa;	2005- 2009	Terkait dengan Program infrastruktur, pembangunan fasilitas umum	Dep Dalam Negeri dan Pemda	34.510	APBN, Donor
						Penyediaan sarana dan prasarana kantor; penyediaan peralatan pemadam kebakaran, ambulan dan peralatan manajemen bencana	Tersedianya sarana kantor (cth: bangku, meja, lemari, komputer, printer) dan tersedianya 22 kantor dinas/badan, 4 kantor kecamatan dan 36 kantor desa; serta peralatan pemadam kebakaran ambulan dan peralatan manajemen bencana	2005- 2009				

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Program	Kegiatan	Sasaran	Kelompok Sasaran	Cakupan Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Waktu	Keterkaitan dengan Program Lain	Instansi Pelaksana	Biaya (Rp miliar)	Sumber Biaya
			Penyediaan sarana dan kantor sistem informasi pelayanan masyarakat (Media Centre)	Tersedianya sarana dan kantor informasi pelayanan masyarakat (Media centre);	Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat	Pembangunan kantor sistem informasi dan penyediaan sarana kerja	Tersedianya 1 kantor informasi pelayanan masyarakat	2005-2009				
		Program pemberdayaan kelembagaan sosial	Penyediaan sarana dan prasarana berupa bale musyawarah bagi masyarakat / lembaga agama, adat, dan sosial lainnya (a.l. Tuha Peut, dll)	Tersedianya sarana dan prasarana berupa bale sebagai tempat musyawarah bagi masyarakat/ lembaga agama, adat, dan sosial lainnya (a.l. Tuha Peut, dll).	Masyarakat	Pembangunan sejumlah bale sebagai tempat bermusyawarah.	Terlaksananya proses partisipasi masyarakat	2005-2009				

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Program	Kegiatan	Sasaran	Kelompok Sasaran	Cakupan Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Waktu	Keterkaitan dengan Program Lain	Instansi Pelaksana	Biaya (Rp miliar)	Sumber Biaya
5	Kabupaten Aceh Jaya	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah;	Penyediaan sarana dan kantor darurat pada tahap tanggap darurat ; penyusunan masterplan dan rencana teknis rehabilitasi kantor; penyediaan bangunan kantor permanen;	Tersedianya sarana pemerintahan, kantor pemerintah dan rencana perbaikan kantor;	Pemerintah Kabupaten	Penyusunan masterplan dan rencana teknis rehabilitasi 1 kantor Bupati, 13 kantor dinas/badan, 5 kantor kecamatan dan 74 kantor desa;	Tersusunnya masterplan dan rencana teknis rehabilitasi untuk 1 kantor Bupati, 13 kantor dinas/badan, 5 kantor kecamatan dan 74 kantor desa;	2005- 2009	Terkait dengan Program infrastruktur, pembangunan fasilitas umum	Dep Dalam Negeri dan Pemda	30.865	APBN, Donor
						Penyediaan sarana dan prasarana kantor; penyediaan peralatan pemadam kebakaran, ambulans dan peralatan manajemen bencana	Tersedianya sarana kantor (cth: bangku, meja, lemari, printer) dan tersedianya 1 kantor Bupati, 13 kantor dinas/badan, 5 kantor kecamatan dan 74 kantor desa serta peralatan pemadam kebakaran ambulans dan peralatan manajemen bencana	2005- 2009				

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Program	Kegiatan	Sasaran	Kelompok Sasaran	Cakupan Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Waktu	Keterkaitan dengan Program Lain	Instansi Pelaksana	Biaya (Rp miliar)	Sumber Biaya
			Penyediaan sarana dan kantor sistem informasi pelayanan masyarakat (Media Centre)	Tersedianya sarana dan kantor informasi pelayanan masyarakat (Media centre);	Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat	Pembangunan kantor sistem informasi dan penyediaan sarana kerja	Tersedianya 1 kantor informasi pelayanan masyarakat	2005-2009				
		Program pemberdayaan kelembagaan sosial	Penyediaan sarana dan prasarana berupa bale sebagai tempat musyawarah bagi masyarakat / lembaga agama, adat, dan sosial lainnya (a.l. Tuha Peut, dll)	Tersedianya sarana dan prasarana berupa bale sebagai tempat musyawarah bagi masyarakat/ lembaga agama, adat, dan sosial lainnya (a.l. Tuha Peut, dll).	Masyarakat	Pembangunan sejumlah bale sebagai tempat bermusyawarah.	Terlaksananya proses partisipasi masyarakat	2005-2009				

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Program	Kegiatan	Sasaran	Kelompok Sasaran	Cakupan Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Waktu	Keterkaitan dengan Program Lain	Instansi Pelaksana	Biaya (Rp miliar)	Sumber Biaya
6	Kabupaten Bireun	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah;	Penyediaan sarana dan kantor darurat pada tahap tanggap darurat ; penyusunan masterplan dan rencana teknis rehabilitasi kantor; penyediaan bangunan kantor permanen;	Tersedianya sarana pemerintahan, kantor pemerintah dan rencana perbaikan kantor;	Pemerintah Kabupaten	Penyusunan masterplan dan rencana teknis rehabilitasi 23 kantor desa;	Tersusunnya masterplan dan rencana teknis rehabilitasi untuk 23 kantor desa;	2005- 2009	Terkait dengan Program infrastruktur, pembangunan fasilitas umum	Depdagri dan Pemda	9.415	APBN, Donor
						Penyediaan sarana dan prasarana kantor; penyediaan peralatan pemadam kebakaran, ambulan dan peralatan manajemen bencana	Tersedianya sarana kantor (cth: bangku, meja, lemari, printer) dan tersedianya 23 kantor desa serta peralatan pemadam kebakaran ambulan dan peralatan manajemen bencana	2005- 2009				

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Program	Kegiatan	Sasaran	Kelompok Sasaran	Cakupan Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Waktu	Keterkaitan dengan Program Lain	Instansi Pelaksana	Biaya (Rp miliar)	Sumber Biaya
			Penyediaan sarana dan kantor sistem informasi pelayanan masyarakat (Media Centre)	Tersedianya sarana dan kantor informasi pelayanan masyarakat (Media centre);	Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat	Pembangunan kantor sistem informasi dan penyediaan sarana kerja	Tersedianya 1 kantor informasi pelayanan masyarakat	2005-2009				
		Program pemberdayaan kelembagaan sosial	Penyediaan sarana dan prasarana berupa bale musyawarah bagi masyarakat / lembaga agama, adat, dan sosial lainnya (a.l. Tuha Peut, dll)	Tersedianya sarana dan prasarana berupa bale sebagai tempat musyawarah bagi masyarakat/ lembaga agama, adat, dan sosial lainnya (a.l. Tuha Peut, dll).	Masyarakat	Pembangunan sejumlah bale sebagai tempat bermusyawarah.	Terlaksananya proses partisipasi masyarakat	2005-2009				

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Program	Kegiatan	Sasaran	Kelompok Sasaran	Cakupan Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Waktu	Keterkaitan dengan Program Lain	Instansi Pelaksana	Biaya (Rp miliar)	Sumber Biaya
7	Kabupaten Pidie	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah;	Penyediaan sarana dan kantor darurat pada tahap tanggap darurat; penyusunan masterplan dan rencana teknis rehabilitasi kantor; penyediaan bangunan kantor permanen;	Tersedianya sarana pemerintahan, kantor pemerintah dan rencana perbaikan kantor;	Pemerintah Kabupaten	Penyusunan masterplan dan rencana teknis rehabilitasi 2 kantor dinas/badan, 32 kantor desa;	Tersusunnya masterplan dan rencana teknis rehabilitasi untuk 2 kantor dinas/badan, dan 32 kantor desa;	2005- 2009	Terkait dengan Program infrastruktur, pembangunan fasilitas umum	Depdagri dan Pemda	12.370	APBN, Donor
						Penyediaan sarana dan prasarana kantor; penyediaan peralatan pemadam kebakaran, ambulan dan peralatan manajemen bencana	Tersedianya sarana kantor (cth: bangku, meja, lemari, komputer, printer) dan tersedianya 2 kantor dinas/badan, dan 32 kantor desa serta peralatan pemadam kebakaran ambulan dan peralatan manajemen bencana	2005- 2009				

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Program	Kegiatan	Sasaran	Kelompok Sasaran	Cakupan Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Waktu	Keterkaitan dengan Program Lain	Instansi Pelaksana	Biaya (Rp miliar)	Sumber Biaya
			Penyediaan sarana dan kantor sistem informasi pelayanan masyarakat (Media Centre)	Tersedianya sarana dan kantor informasi pelayanan masyarakat (Media centre);	Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat	Pembangunan kantor sistem informasi dan penyediaan sarana kerja	Tersedianya 1 kantor informasi pelayanan masyarakat	2005-2009				
		Program pemberdayaan kelembagaan sosial	Penyediaan sarana dan prasarana berupa bale sebagai tempat musyawarah bagi masyarakat / lembaga agama, adat, dan sosial lainnya (a.l. Tuha Peut, dll)	Tersedianya sarana dan prasarana berupa bale sebagai tempat musyawarah bagi masyarakat/ lembaga agama, adat, dan sosial lainnya (a.l. Tuha Peut, dll).	Masyarakat	Pembangunan sejumlah bale sebagai tempat bermusyawarah.	Terlaksananya proses partisipasi masyarakat	2005-2009				

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Program	Kegiatan	Sasaran	Kelompok Sasaran	Cakupan Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Waktu	Keterkaitan dengan Program Lain	Instansi Pelaksana	Biaya (Rp miliar)	Sumber Biaya
8	Kabupaten Aceh Utara	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah;	Penyediaan sarana dan kantor darurat pada tahap tanggap darurat; penyusunan masterplan dan rencana teknis rehabilitasi kantor; penyediaan bangunan kantor permanen;	Tersedianya sarana pemerintahan, kantor pemerintah dan rencana perbaikan kantor;	Pemerintah Kabupaten	Penyusunan masterplan dan rencana teknis rehabilitasi 91 kantor desa;	Tersusunnya masterplan dan rencana teknis rehabilitasi untuk 91 kantor desa;	2005- 2009	Terkait dengan Program infrastruktur, pembangunan fasilitas umum	Depdagri dan Pemda	16.555	APBN, Donor
						Penyediaan sarana dan prasarana kantor; penyediaan peralatan pemadam kebakaran, ambulan dan peralatan manajemen bencana	Tersedianya sarana kantor (cth: bangku, meja, lemari, printer) dan tersedianya 91 kantor desa serta peralatan pemadam kebakaran ambulan dan peralatan manajemen bencana	2005- 2009				

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Program	Kegiatan	Sasaran	Kelompok Sasaran	Cakupan Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Waktu	Keterkaitan dengan Program Lain	Instansi Pelaksana	Biaya (Rp miliar)	Sumber Biaya
			Penyediaan sarana dan kantor sistem informasi pelayanan masyarakat (Media Centre)	Tersedianya sarana dan kantor informasi pelayanan masyarakat (Media centre);	Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat	Pembangunan kantor sistem informasi dan penyediaan sarana kerja	Tersedianya 1 kantor informasi pelayanan masyarakat	2005-2009				
		Program pemberdayaan kelembagaan sosial	Penyediaan sarana dan prasarana berupa bale musyawarah bagi masyarakat / lembaga agama, adat, dan sosial lainnya (a.l. Tuha Peut, dll)	Tersedianya sarana dan prasarana berupa bale sebagai tempat musyawarah bagi masyarakat/ lembaga agama, adat, dan sosial lainnya (a.l. Tuha Peut, dll).	Masyarakat	Pembangunan sejumlah bale sebagai tempat bermusyawarah.	Terlaksananya proses partisipasi masyarakat	2005-2009				

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Program	Kegiatan	Sasaran	Kelompok Sasaran	Cakupan Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Waktu	Keterkaitan dengan Program Lain	Instansi Pelaksana	Biaya (Rp miliar)	Sumber Biaya
9	Kabupaten Aceh Timur	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah;	Penyediaan sarana dan kantor darurat pada tahap tanggap darurat; penyusunan masterplan dan rencana teknis rehabilitasi kantor; penyediaan bangunan kantor permanen;	Tersedianya sarana pemerintahan, kantor pemerintah dan rencana perbaikan kantor;	Pemerintah Kabupaten	Penyusunan masterplan dan rencana teknis rehabilitasi 3 kantor desa;	Tersusunnya masterplan dan rencana teknis rehabilitasi untuk 3 kantor desa;	2005- 2009	Terkait dengan Program infrastruktur, pembangunan fasilitas umum	Depdagri dan Pemda	7.315	APBN, Donor
						Penyediaan sarana dan prasarana kantor; penyediaan peralatan pemadam kebakaran, ambulan dan peralatan manajemen bencana	Tersedianya sarana kantor (cth: bangku, meja, lemari, printer) dan tersedianya 3 kantor desa serta peralatan pemadam kebakaran ambulan dan peralatan manajemen bencana	2005- 2009				

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Program	Kegiatan	Sasaran	Kelompok Sasaran	Cakupan Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Waktu	Keterkaitan dengan Program Lain	Instansi Pelaksana	Biaya (Rp miliar)	Sumber Biaya
			Penyediaan sarana dan kantor sistem informasi pelayanan masyarakat (Media Centre)	Tersedianya sarana dan kantor informasi pelayanan masyarakat (Media centre);	Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat	Pembangunan kantor sistem informasi dan penyediaan sarana kerja	Tersedianya 1 kantor informasi pelayanan masyarakat	2005-2009				
		Program pemberdayaan kelembagaan sosial	Penyediaan sarana dan prasarana berupa bale sebagai tempat musyawarah bagi masyarakat / lembaga agama, adat, dan sosial lainnya (a.l. Tuha Peut, dll)	Tersedianya sarana dan prasarana berupa bale sbg tempat musyawarah bagi masyarakat/ lembaga agama, adat, dan sosial lainnya (a.l. Tuha Peut, dll).	Masyarakat	Pembangunan sejumlah bale sebagai tempat bermusyawarah.	Terlaksananya proses partisipasi masyarakat	2005-2009				

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Program	Kegiatan	Sasaran	Kelompok Sasaran	Cakupan Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Waktu	Keterkaitan dengan Program Lain	Instansi Pelaksana	Biaya (Rp miliar)	Sumber Biaya
10	Kab Simeleu	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah;	Penyediaan sarana dan kantor darurat pada tahap tanggap darurat; penyusunan masterplan dan rencana teknis rehabilitasi kantor; penyediaan bangunan kantor permanen;	Tersedianya sarana pemerintahan, kantor pemerintah dan rencana perbaikan kantor;	Pemerintah Kabupaten	Penyusunan masterplan dan rencana teknis rehabilitasi untuk 1 kantor Bupati, 1 kantor DPRD dan 39 kantor desa;	Tersusunnya masterplan dan rencana teknis rehabilitasi untuk 1 kantor Bupati, 1 kantor DPRD dan 39 kantor desa;	2005-2009	Terkait dengan Program infrastruktur, pembangunan fasilitas umum	Depdagri dan Pemda	13.105	APBN, Donor
						Penyediaan sarana dan prasarana kantor; penyediaan peralatan pemadam kebakaran, ambulan dan peralatan manajemen bencana	Tersedianya sarana kantor (cth: bangku, meja, lemari, legislatif, printer) untuk 1 kantor Bupati, 1 kantor DPRD dan 39 kantor desa serta peralatan pemadam kebakaran ambulan dan peralatan manajemen bencana	2005-2009				

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Program	Kegiatan	Sasaran	Kelompok Sasaran	Cakupan Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Waktu	Keterkaitan dengan Program Lain	Instansi Pelaksana	Biaya (Rp miliar)	Sumber Biaya
			Penyediaan sarana dan kantor sistem informasi pelayanan masyarakat (Media Centre)	Tersedianya sarana dan kantor informasi pelynan masy (Media centre);	Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat	Pembangunan kantor sistem informasi dan penyediaan sarana kerja	Tersedianya 1 kantor informasi pelayanan masyarakat	2005-2009				
		Program pemberdayaan kelembagaan sosial	Penyediaan sarana dan prasarana berupa bale sebagai tempat musyawarah bagi masyarakat / lembaga agama, adat, dan sosial lainnya (a.l. Tuha Peut, dll)	Tersedianya sarana dan prasarana berupa bale sebagai tempat musyawarah bagi masyarakat/ lembaga agama, adat, dan sosial lainnya (a.l. Tuha Peut, dll).	Masyarakat	Pembangunan sejumlah bale sebagai tempat bermusyawarah.	Terlaksananya proses partisipasi masyarakat	2005-2009				

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Program	Kegiatan	Sasaran	Kelompok Sasaran	Cakupan Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Waktu	Keterkaitan dengan Program Lain	Instansi Pelaksana	Biaya (Rp miliar)	Sumber Biaya
11	Kota Sabang	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah;	Penyediaan sarana dan kantor darurat pada tahap tanggap darurat; penyusunan masterplan dan rencana teknis rehabilitasi kantor; penyediaan bangunan kantor permanen;	Tersedianya sarana pemerintahan, kantor pemerintah dan rencana perbaikan kantor;	Pemerintah Kota	Penyusunan masterplan dan rencana teknis rehabilitasi 1 kantor camat dan 2 kantor lurah;	Tersusunnya masterplan dan rencana teknis rehabilitasi untuk 1 kantor Camat dan 2 kantor Lurah;	2005-2009	Terkait dengan Program infrastruktur, pembangunan fasilitas umum	Depdagri dan Pemda	7.615	APBN, Donor
						Penyediaan sarana dan prasarana kantor; penyediaan peralatan pemadam kebakaran, ambulan dan peralatan manajemen bencana	Tersedianya sarana kantor (cth: bangku, meja, lemari, printer) dan tersedianya kantor Camat dan 2 kantor lurah serta peralatan pemadam kebakaran ambulan dan peralatan manajemen bencana	2005-2009				

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Program	Kegiatan	Sasaran	Kelompok Sasaran	Cakupan Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Waktu	Keterkaitan dengan Program Lain	Instansi Pelaksana	Biaya (Rp miliar)	Sumber Biaya
			Penyediaan sarana dan kantor sistem informasi pelayanan masyarakat (Media Centre)	Tersedianya sarana dan kantor informasi pelayanan masyarakat (Media centre);	Pemerintah Kota dan Masyarakat	Pembangunan kantor sistem informasi dan penyediaan sarana kerja	Tersedianya 1 kantor informasi pelayanan masyarakat	2005-2009				
		Program pemberdayaan kelembagaan sosial	Penyediaan sarana dan prasarana berupa bale sebagai tempat musyawarah bagi masyarakat / lembaga agama, adat, dan sosial lainnya (a.l. Tuha Peut, dll)	Tersedianya sarana dan prasarana berupa bale sebagai tempat musyawarah bagi masyarakat/ lembaga agama, adat, dan sosial lainnya (a.l. Tuha Peut, dll).	Masyarakat	Pembangunan sejumlah bale sebagai tempat bermusyawarah.	Terlaksananya proses partisipasi masyarakat	2005-2009				

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Program	Kegiatan	Sasaran	Kelompok Sasaran	Cakupan Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Waktu	Keterkaitan dengan Program Lain	Instansi Pelaksana	Biaya (Rp miliar)	Sumber Biaya
12	Kota Lhokseumawe	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah;	Penyediaan sarana dan kantor darurat pada tahap tanggap darurat; penyusunan masterplan dan rencana teknis rehabilitasi kantor; penyediaan bangunan kantor permanen;	Tersedianya sarana pemerintahan, kantor pemerintah dan rencana perbaikan kantor;	Pemerintah Kota	Penyusunan masterplan dan rencana teknis rehabilitasi 3 kantor dinas/badan, dan 4 kantor lurah;	Tersusunnya masterplan dan rencana teknis rehabilitasi untuk 3 kantor dinas/badan dan 4 kantor lurah;	2005- 2009	Terkait dengan Program infrastruktur, pembangunan fasilitas umum	Depdagri dan Pemda	10.435	APBN, Donor
						Penyediaan sarana dan prasarana kantor; penyediaan peralatan pemadam kebakaran, ambulan dan peralatan manajemen bencana	Tersedianya sarana kantor (cth: bangku, meja, lemari, printer) dan tersedianya 3 kantor dinas/badan dan 4 kantor lurah serta peralatan pemadam kebakaran ambulan dan peralatan manajemen bencana	2005- 2009				

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Program	Kegiatan	Sasaran	Kelompok Sasaran	Cakupan Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Waktu	Keterkaitan dengan Program Lain	Instansi Pelaksana	Biaya (Rp miliar)	Sumber Biaya
			Penyediaan sarana dan kantor sistem informasi pelayanan masyarakat (Media Centre)	Tersedianya sarana dan kantor informasi pelayanan masyarakat (Media centre);	Pemerintah Kota dan Masyarakat	Pembangunan kantor sistem informasi dan penyediaan sarana kerja	Tersedianya 1 kantor informasi pelayanan masyarakat	2005-2009				
		Program pemberdayaan kelembagaan sosial	Penyediaan sarana dan prasarana berupa bale sebagai tempat musyawarah bagi masyarakat / lembaga agama, adat, dan sosial lainnya (a.l. Tuha Peut, dll)	Tersedianya sarana dan prasarana berupa bale sebagai tempat musyawarah bagi masyarakat/ lembaga agama, adat, dan sosial lainnya (a.l. Tuha Peut, dll).	Masyarakat	Pembangunan sejumlah bale sebagai tempat bermusyawarah.	Terlaksananya proses partisipasi masyarakat	2005-2009				

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Program	Kegiatan	Sasaran	Kelompok Sasaran	Cakupan Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Waktu	Keterkaitan dengan Program Lain	Instansi Pelaksana	Biaya (Rp miliar)	Sumber Biaya
13	Kabupaten Nias	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah;	Penyediaan sarana dan kantor darurat pada tahap tanggap darurat; penyusunan masterplan dan rencana teknis rehabilitasi kantor; penyediaan bangunan kantor permanen;	Tersedianya sarana pemerintahan, kantor pemerintah dan rencana perbaikan kantor;	Pemerintah Kabupaten	Penyusunan masterplan dan rencana teknis rehabilitasi untuk 1 kantor bupati, 4 kantor camat	Tersusunnya masterplan dan rencana teknis rehabilitasi untuk 1 kantor bupati, 4 kantor camat	2005- 2009	Terkait dengan Program infrastruktur, pembangunan fasilitas umum	Depdagri dan Pemda	7.625	APBN, Donor
						Penyediaan sarana dan prasarana kantor; penyediaan peralatan pemadam kebakaran, ambulan dan peralatan manajemen bencana	Tersedianya sarana kantor (cth: bangku, meja, lemari, komputer, printer) dan tersedianya 1 kantor bupati, 4 kantor camat serta peralatan pemadam kebakaran ambulan dan peralatan manajemen bencana	2005- 2009				

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Program	Kegiatan	Sasaran	Kelompok Sasaran	Cakupan Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Waktu	Keterkaitan dengan Program Lain	Instansi Pelaksana	Biaya (Rp miliar)	Sumber Biaya
			Penyediaan sarana dan kantor sistem informasi pelayanan masyarakat (Media Centre)	Tersedianya sarana dan kantor informasi pelayanan masyarakat (Media centre);	Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat	Pembangunan kantor sistem informasi dan penyediaan sarana kerja	Tersedianya 1 kantor informasi pelayanan masyarakat	2005-2009				

LAMPIRAN B – Kompilasi Data

Tabel B1
Data Kondisi Aparat Pemerintah Pada Instansi Vertikal

No	PROVINSI KAB/KOTA	KORBAN				KORBAN				KORBAN				KORBAN				KORBAN			
		PERSONIL BPN				PERSONIL TNI				PERSONIL POLRI				JAKSA				ANGGOTA DPRD			
		M	H	S	JMLH	M	H	S	JMLH	M	H	S	JMLH	M	H	S	JMLH	M	H	S	JMLH
1	KOTA BANDA ACEH																				
2	KAB. ACEH SELATAN																				
3	KAB. ACEH BESAR																				
4	KAB. ACEH UTARA																				
5	KAB. ACEH BARAT																	1			
6	KAB. PIDIE																				
7	KAB. BIEREUN																				
8	KOTA LHOKSEUMAWA																				
9	KAB. ACEH JAYA																				
10	KAB. NAGAN RAYA																				
11	KAB. ACEH BARAT DAYA																				
12	KAB. ACEH TIMUR																				
13	KOTA LANGSA																				
14	KAB. ACEH TENGGARA																				
15	KAB. ACEH TENGAH																				
16	KAB. SIMEULUE																				
17	KAB. GAYO LUES																				
18	KAB. ACEH SINGKIL																				

No	PROVINSI KAB/KOTA	KORBAN				KORBAN				KORBAN				KORBAN				KORBAN			
		PERSONIL BPN				PERSONIL TNI				PERSONIL POLRI				JAKSA				ANGGOTA DPRD			
		M	H	S	JMLH	M	H	S	JMLH	M	H	S	JMLH	M	H	S	JMLH	M	H	S	JMLH
19	KAB. ACEH TAMIANG																				
20	KOTA SABANG																				
21	KAB. BENER MERIAH																				
22	PROVINSI NAD																				3
	JUMLAH	40			507	63	302			170	952			105						4	

Ket:: M : Mati; H : Hilang; S : Selamat. Data Depdagri versi Februari 2005

Tabel B2.
Rekap PNS Provinsi, Kabupaten/Kota Korban Gempa Bumi Dan Tsunami

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah PNS	Jumlah Korban PNS Adm.			Jumlah Korban PNS Guru			Total Korban (6+9)	Jumlah/ Kondisi PNS Sekarang (3-10)
			Meninggal	Hilang	Total	Meninggal	Hilang	Total		
1	Provinsi NAD	7,110	435	582	1,017	-	-	-	1,017	6,093
2	Kota Banda Aceh	5,892	140	786	926	499	394	893	1,819	4,073
3	Kota Sabang	1,447	30	-	30	9	1	10	40	1,407
4	Kabupaten Aceh Besar	7,150	341	306	647	648	90	738	1,385	5,765
5	Kabupaten Pidie	7,931	42	-	42	126	39	165	207	7,724
6	Kabupaten Aceh Utara	6,339	-	-	-	35	-	35	35	6,304
7	Kabupaten Bireuen	6,441	20	-	20	26	-	26	46	6,395
8	Kabupaten Aceh Timur	4,026	1	2	3	-	-	-	3	4,023
9	Kabupaten Aceh Tengah	4,810	-	7	7	4	-	4	11	4,799
10	Kabupaten Aceh Barat	3,989	-	32	32	237	-	237	269	3,720
11	Kabupaten Aceh Jaya	1,190	-	29	29	323	-	323	352	838
12	Kabupaten Aceh Barat Daya	1,013	-	-	-	10	-	10	10	1,003
13	Kabupaten Nagan Raya	1,916	-	-	-	27	-	27	27	1,889
14	Kabupaten Simeulue	1,470	3	3	6	4	-	4	10	1,460
15	Kabupaten Aceh Selatan	1,321	-	-	-	14	-	14	14	1,307
16	Kabupaten Singkil	1,944	-	-	-	-	-	-	-	1,944
17	Kabupaten Aceh Tenggara	3,577	-	1	1	-	-	-	1	3,576
18	Kabupaten Gayo Lwes	930	4	-	4	1	-	1	5	925

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah PNS	Jumlah Korban PNS Adm.			Jumlah Korban PNS Guru			Total Korban (6+9)	Jumlah/ Kondisi PNS Sekarang (3-10)
			Meninggal	Hilang	Total	Meninggal	Hilang	Total		
19	Kabupaten Aceh Tamiang	2,687	-	1	1	-	-	-	1	2,686
20	Kabupaten Bener Meriah	1,625	1	-	1	-	-	-	1	1,624
21	Kota Lhokseumawe	1,716	-	1	1	10	-	10	11	1,705
22	Kota Langsa	2,131	-	-	-	2	-	2	2	2,129
Jumlah Keseluruhan		76,655	1,017	1,750	2,767	1,975	524	2,499	5,266	71,389

Sumber: Sekretaris Daerah Provinsi NAD,2005

Tabel B-3.
Data Kondisi Bangunan Kantor di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

PROVINSI/KAB/KOTA	KANTOR BPN			KANTOR KEJAKSAAN			KANTOR DEPHUMHAM			KANTOR LEMBAGA INFOKOM			KANTOR POLRI			GUBERNUR/BUPATI / WALIKOTA			DINAS			BADAN			KECAMATAN			DESA / KELURAHAN				
	B	TB	JMLH	B	TB	JMLH	B	TB	JMLH	B	TB	JMLH	B	TB	JMLH	B	TB	JMLH	B	TB	JMLH	B	TB	JMLH	B	TB	JMLH	B	TB	JMLH	B	TB
KOTA BANDA ACEH		1			1			3			1					1		1	3	13	16	11	1	12	6	3	9	46	43	89		
KAB. ACEH SELATAN														2		1		1	17		17	10		10	16	0	16	237	10	247		
KAB. ACEH BESAR								1						2		1		1	12		12	16		16	16	6	22	498	103	601		
KAB. ACEH UTARA														5		1		1	20		20	16		16	22	0	22	761	91	852		
KAB. ACEH BARAT		1			1						1			5		1		1	10	14	24		8	8	7	4	11	285	36	321		
KAB. PIDIE								1			1			3		1		1	10	2	12	10		10	30	0	30	916	32	948		
KAB. BIEREUN																1		1	11		11	7		7	17	0	17	529	23	552		
KOTA LHOKSEUMAWA											1					1		1	4	3	7	8		8	3	0	3	64	4	68		
KAB. ACEH JAYA														2			1	1		10	10		3	3	1	5	6	96	74	170		
KAB. NAGAN RAYA																1		1	8		8	8		8	3	2	5	206	16	222		
KAB. ACEH BARAT DAYA					1											1		1	10		10	5		5	6	0	6	129	0	129		
KAB. ACEH TIMUR														2		1		1	16		16	14		14	21	0	21	481	3	484		
KOTA LANGSA											1					1		1	7		7	6		6	3	0	3	51	0	51		
KAB. ACEH TENGGARA														2		1		1	14		14	13		13	11	0	11	250	0	250		
KAB. ACEH TENGAH														2		1		1	14		14	10		10	7	3	10	46	163	209		

PROVINSI/KAB/KOTA	KANTOR BPN			KANTOR KEJAKSAAN			KANTOR DEPHUMHAM			KANTOR LEMBAGA INFOKOM			KANTOR POLRI			GUBERNUR/BUPATI / WALIKOTA			DINAS			BADAN			KECAMATAN			DESA / KELURAHAN		
	B	TB	JMLH	B	TB	JMLH	B	TB	JMLH	B	TB	JMLH	B	TB	JMLH	B	TB	JMLH	B	TB	JMLH	B	TB	JMLH	B	TB	JMLH	B	TB	JMLH
KAB. SIMEULUE					1			1					3			1	1	16		16	7		7	8	0	8	98	39	137	
KAB. GAYO LUES															1		1	14		14	4		4	11	0	11	97	0	97	
KAB. ACEH SINGKIL										1			2		1		1	19		19	7		7	13	0	13	138	1	139	
KAB. ACEH TAMIANG															1		1	6		6	12		12	8	0	8	209	0	209	
KOTA SABANG					1								4		1		1	13		13	6		6	1	1	2	16	2	18	
KAB. BENER MERIAH															1		1	8		8	2		2	7	0	7	115	0	115	
PROVINSI NAD		1			1						2					1	1	16	7	23	4	10	14	0	0	0	0	0	0	
JUMLAH		3	0	0	6	0	0	6	0	0	8	0	137	34	171	18	3	22	248	49	297	176	22	198	217	24	241	5268	640	5908

Tabel B4.
Perkiraan Kebutuhan Biaya Sektor Pemerintahan

No	Kabupaten/ Kota/Provinsi	Kantor desa/kelurahan yang tidak berfungsi	Kantor kecamatan yang tidak berfungsi	Kantor bupati/walikota/ gubernur/dinas/ badan yang tidak berfungsi	Perkiraan Kerugian Kantor dan Peralatan dan Furniture (Rupiah)
1	KOTA BANDA ACEH	43	3	14	19,800,000,000
2	KAB. ACEH SELATAN	10	0	0	1,050,000,000
3	KAB. ACEH BESAR	103	6	0	13,245,000,000
4	KAB. ACEH UTARA	91	0	0	9,555,000,000
5	KAB. ACEH BARAT	36	4	22	27,510,000,000
6	KAB. PIDIE	32	0	2	5,370,000,000
7	KAB. BIEREUN	23	0	0	2,415,000,000
8	KOTA LHOKSEUMAWE	4	0	3	3,435,000,000
9	KAB. ACEH JAYA	74	5	14	23,865,000,000
10	KAB. NAGAN RAYA	16	2	0	2,490,000,000
11	KAB. ACEH BARAT DAYA	0	0	0	-
12	KAB. ACEH TIMUR	3	0	0	315,000,000
13	KOTA LANGSA	0	0	0	-
14	KAB. ACEH TENGGARA	0	0	0	-
15	KAB. ACEH TENGAH	163	3	0	18,330,000,000
16	KAB. SIMEULUE	39	0	2	5,100,000,000
17	KAB. GAYO LUES	0	0	0	-
18	KAB. ACEH SINGKIL	1	0	0	105,000,000
19	KAB. ACEH TAMIANG	0	0	0	-

No	Kabupaten/ Kota/Provinsi	Kantor desa/kelurahan yang tidak berfungsi	Kantor kecamatan yang tidak berfungsi	Kantor bupati/walikota/ gubernur/dinas/ badan yang tidak berfungsi	Perkiraan Kerugian Kantor dan Peralatan dan Furniture (Rupiah)
20	KOTA SABANG	2	1	0	615,000,000
21	KAB. BENER MERIAH	0	0	0	-
22	PROVINSI NAD	0	0	18	72,090,000,000
23	KAB. NIAS	0	4	0	2, 625,000,000
24	KAB. SAMOSIR	0	0	1	1.005.000.000
	Jumlah	640	24	73	206,910,000,000

Tabel B5.
Rekapitulasi Bantuan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Untuk Bencana Gempa Bumi dan Tsunami
di Provinsi NAD dan Sumatera Utara

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	JENIS BANTUAN				KETERANGAN
		UANG TUNAI (Rp)	BAHAN/BARANG	TENAGA	PERALATAN	
1	Sulawesi Selatan	1,000,000,000		350 relawan dan 40 dokter	Dapur Umum	Informasi : posko DDN Banda Aceh 9 Januari 2005
2	Riau	4,331,245,850	Makanan (4579 karton); minuman (1689 karton); beras (1705 kg); pakaian (8248 koli); lain-lain (15 karton)	Dokter (8 orang); perawat (10 orang); satpol PP (16 orang); umum (142 orang); operator (21 orang)	Ambulan (2 unit); motor grader (2 unit); excavator(1 unit); wheel excavator (1 unit); wheel loader (6 unit); dump truck (1 unit)	Informasi : Surat Gubernur Riau No 460/ BKSP/ 40.01 tanggal 11 Januari 2005
3	Sumatera Barat	1,266,554,308	Makanan (9051 karton); minuman (1922 karton); pakaian (21223 koli); obat-obatan dan lainnya (Rp 1051000000); obat-obatan (14451 kotak); obat, makanan, minuman, pakaian (117 ton); lain-lain (34 kotak)	Dokter dan evakuasi (303 orang); umum (67 orang)	Speed boat (10 unit); lain-lain (8 kotak)	Informasi : Surat Gubernur Riau No 460/ BKSP/ 40.01 tanggal 11 Januari 2005
4	Lampung	3,000,000,000	Makanan (328 koli); pakaian (1744 koli); obat-obatan (1 koli); kelengkapan mandi/cuci (10 koli); kelengkapan sholat (1koli);kasur lipat (1koli); tikar (1 koli)	Medis (56 orang); operator (5 orang); lapangan (77 orang)		Informasi : Surat Gubernur Riau No 900/0083/07/2005 tanggal 14 Januari 2005

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	JENIS BANTUAN				KETERANGAN
		UANG TUNAI (Rp)	BAHAN/BARANG	TENAGA	PERALATAN	
5	Sumatera Selatan	0	Makanan, obat-obatan, alat kesehatan, pakaian layak pakai (165 ton); perlengkapan rumah sakit (11 koli)	<p>Tahap 1: Dr spesialis (11 orang); Dr resident/Dr didik (23 orang); perawat (24 orang); paramedis (24 orang); PMI (9 orang)</p> <p>Tahap 2 : dokter (18 orang); tenaga medis/perawat (50 orang); wartawan media cetak dan elektronik (12 orang); relawan (19 orang); backkang Dam II Sriwijaya (9 orang); sopir (4 orang)</p> <p>Tahap 3 : tenaga medis (60 orang); PMI (5 orang) dan Da'i (15 orang)</p> <p>Tahap 4 : tenaga medis/paramedis (62 orang); PLN (4 orang); PMI (6 orang) dan Da'i (5 orang)</p>	Tenda dan selimut	Informasi : Surat Gubernur Sumsel No 360/0238/II/2005 perihal dukungan bencana gempa dan tsunami di NAD tanggal 18 Januari 2005

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	JENIS BANTUAN				KETERANGAN
		UANG TUNAI (Rp)	BAHAN/BARANG	TENAGA	PERALATAN	
6	Sulawesi Tengah	200,000,000				Berita acara serah terima bantuan pada hari kamis tanggal 21 Januari 2005 dan berita acara serah terima bantuan pada hari rabu tanggal 19 Januari (dalam hal ini Rp 55,000,000, (kepada Provinsi Sumut) dan 150,000,000 (untuk Provinsi NAD
7	Kalimantan Tengah	1,000,000,000				Surat Gubernur Kalteng No 900/524/Keu tanggal 30 Desember 2004
8	Maluku Utara	730,000,000	Makanan ringan (284 karton); pakaian layak (1684 koli)	45 orang relawan		Laporan informasi Sekda Maluku Utara tanggal 11 Januari 2005
9	Jawa Timur	180,000,000	Beras (126462 kg); makanan (45185 dus); dan lauk pauk			Surat Gubernur Jatim No 360/9992/011/2004 tanggal 30 Desember 2004
10	NTT	0				Surat Gubernur NTT No HK 03.6/1004/2004 tanggal 28 Januari 2004 perihal himbauan

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	JENIS BANTUAN				KETERANGAN
		UANG TUNAI (Rp)	BAHAN/BARANG	TENAGA	PERALATAN	
11	Kepulauan Riau (Kota Pangkal Pinang)	476,734,500	Beras (8610 kg), mie instan (362 dus), air mineral (69 dus); pakaian baru (2928 kotak/karung); jumbo bag (94 lembar); kain sarung baru (128 lembar); kue kering (9 dus); tikar (1 lembar); thermos air (2 buah); susu (1 kotak); sepatu anak-anak (18 pcs)			Informasi : Radiogram walikota Pangkal Pinang No 466.1/001/KESRA/2005
12	DKI	2,000,000,000	Obat-obatan	Tenaga medis (3 orang); medis (100 orang); relawan (34 orang)	Ambulan (1unit); mobil dapur umum (5 unit); mini bus (1unit)	
13	Jawa Tengah	290,000,000		Relawan 40 orang		
14	Gorontalo		Obat-obatan, pakaian	Relawan 20 orang		
15	Papua				Pesawat karafan 1 unit	Surat Wagub No 553.3/07 tanggal 3 Januari 2005
16	Sumatera Utara			Dokter (186 orang); Dokter gigi (16 orang); paramedis (403 orang)	Mobil ambulance 12 unit	
17	Bali	35,000,000				
18	Kalimantan Selatan	2,000,000,000		Relawan (50 orang)		
Total		16,509,534,658				

Sumber: Posko Nasional. Depdagri. Februari 2005

**LAMPIRAN C –
Konsep Kelembagaan Agama dan Adat di Aceh**

LAMPIRAN C - Struktur Kelembagaan Mukim Dan Gampong

Model Kelembagaan Mukim

Mukim adalah sebutan untuk satu wilayah kesatuan masyarakat hukum adat, yang mempunyai batas-batas tertentu, memiliki perangkat dan simbol-simbol adat, hak-hak pemilikan dan penguasaan atas suatu sumber daya dan prasarana serta mempunyai tatanan sosial yang spesifik lokal. Mukim terdiri atas gabungan beberapa **Gampong** yang mempunyai batas wilayah tertentu dan memiliki harta kekayaan sendiri. Mukim berkedudukan langsung di bawah kecamatan/Sagoe Cut.

Ada lima unsur pokok dalam jenjang struktur pemerintahan pada masa Kerajaan Aceh yaitu: Sultan, Panglima Sagoe, Uleebalang, Imuem Mukim dan Keuchiek. Salah satu alasan dibentuknya mukim adalah karena kebutuhan skala ekonomis dan beberapa persyaratan administrasi untuk melakukan suatu kegiatan. Pada masa itu, wilayah teritorial mukim adalah seluas radius orientasi jangkauan mesjid untuk shalat jum'at. Jumlah penduduk mukim berkisar antara 200 – 300 jiwa.

Mukim dipimpin oleh seorang **Imeum Mukim**, yang statusnya mengalami metamorfosa sebagai berikut:

1. Sebutan imam diperoleh dari perannya sebagai imam shalat Jum'at.
2. Dalam perkembangannya peran Imeum Mukim berkembang dalam sistem pemerintahan formal dengan kedudukan diantara Uleebalang dan Keuchiek (Kades).
3. Kemudian Imeum Mukim lebih berspesialisasi dalam **pemerintahan**, dengan sebutan lainnya adalah **Imeum Adat**. Sedangkan imam shalat Jum'at disebut dengan Imeum Mesjid atau Teungku Imeum.

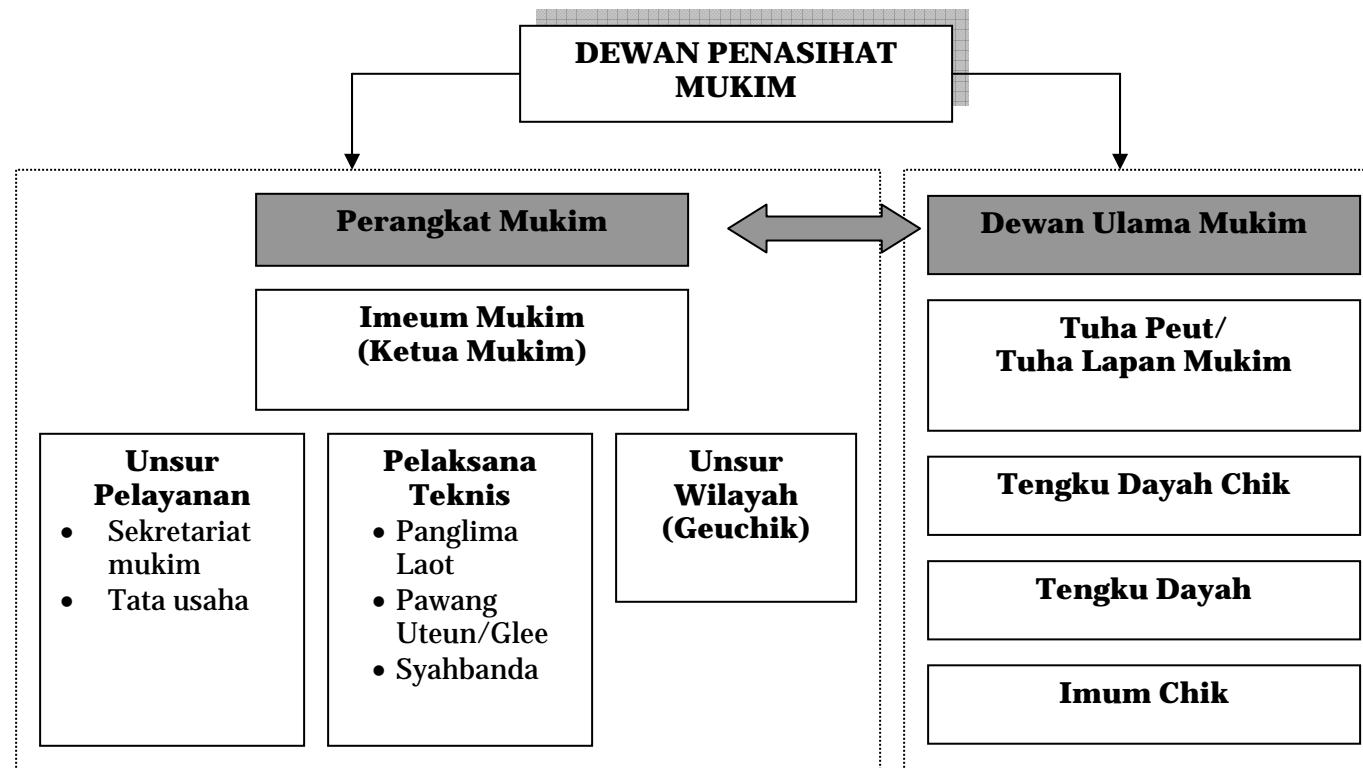
Unsur-unsur lembaga, seperti mukim, yang terdapat dalam masyarakat Aceh adalah:

- **Tuha Peut atau Tuha Lapan:** orang yang paling paham dan berpengalaman di bidang **adat, agama, dan kehidupan kampung** dan dapat menjadi petugas di bidang tertentu.
- **Keujreun:** pejabat pengatur **tanaman pangan dan irigasi (Keujreun Blang)** dan pengatur **pertambangan (Keujreun Meuih)**.
- **Panglima Kawon:** kepala/kepemimpinan suatu **keluarga besar**.

- **Panglima Lhok/Laot:** pejabat koordinator kegiatan mata pencaharian di **laut**
- **Petua Seunebok:** pejabat **pengatur sistem perladangan** dan pembukaan ladang baru.
- **Pawang Glee:** Pejabat pengatur **pemanfaatan areal hutan** dan penjaga ekologi hutan.
- **Raja Kuala :** Pejabat **pengatur tambatan perahu** dan pukot di muara.
- **Haria Peukan :** Pejabat pengelola pasar/pengutip **retribusi pasar**.

Sebagai lembaga masyarakat, mukim dapat dikembangkan secara bertahap, yaitu dengan cara dikembangkan menjadi lebih terorganisasi dan dibina menjadi lebih mandiri. Untuk menjalankan hal tersebut, maka hal yang penting adalah memberdayakan Imeum Mukim untuk: (a) Meningkatkan fungsi mukim sebagai suatu kesatuan masyarakat; (b) Menata lembaga-lembaga kelengkapan mukim dan mengefektifkan peran dan fungsinya seperti Majelis Musyawarah Mukim dan Rapat Adat Mukim; (c) Mengelola harta kekayaan dan pendapatan mukim untuk kepentingan masyarakat.

Gambar - Struktur Kelembagaan Mukim



Penjelasan:

Kelembagaan pemerintah, adat dan agama pada tingkat mukim terdiri atas lembaga-lembaga sebagai berikut:

- **Dewan Penasehat Mukim** merupakan lembaga tertinggi di wilayah mukim. DPM memiliki kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai penasihat mukim.
- **Dewan Ulama Mukim** terdiri dari Imum Chik, Tengku Dayah, tengku Dayah Chik, Tuha Peut/Tuha Lapan Mukim. Dewan ulama mukim merupakan badan konsultatif Imeum Mukim **bidang pemerintahan, pelaksanaan syariat dan adat istiadat.**
- **Tuha Peut/Tuha Lapan Mukim** merupakan lembaga independen yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan mukim. Tuha Peut/Tuha Lapan Mukim merupakan Dewan Legislatif Mukim, hanya saja anggota-anggotanya tidak dipilih melalui pemilihan umum.
- **Perangkat Mukim**, pemerintahan mukim terdiri dari imeum mukim dan perangkat mukim. Perangkat mukim terdiri dari unsur pelayanan (sekretariat mukim dan tata usaha), unsur pelaksana teknis (panglima laot, pawang uteun/glee, syahbanda), dan unsur wilayah (geuchik).

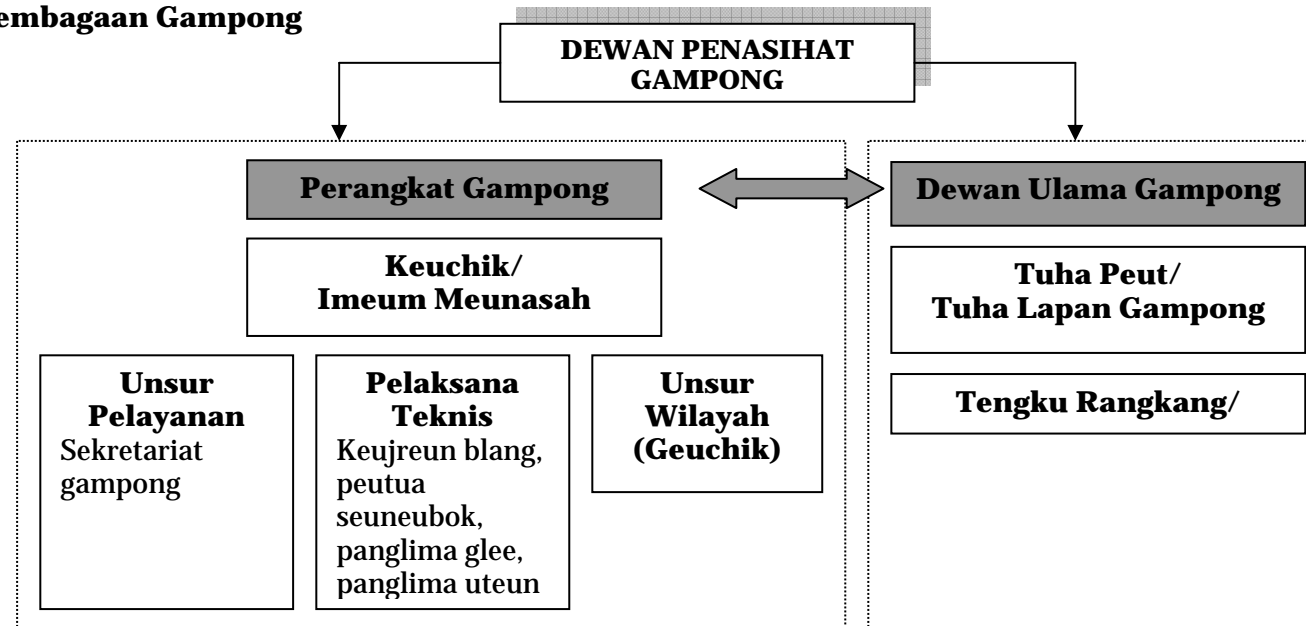
MODEL KELEMBAGAAN GAMPONG DAN MEUSANAH

Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah mukim yang dipimpin oleh Keuchik. Kelembagaan pemerintah, adat dan agama pada tingkat Gampong terdiri atas lembaga-lembaga sebagai berikut:

- Dewan Penasehat Gampong
- Geuchik
- Imeum Meunasah
- Tuha Peut/Tuha Lapan Gampong
- Teungku Rangkang/Dayah
- Sekretariat Gampong
- Keujreun Blang/Peutua Seuneubok/Panglima Glee/Panglima Uteun/Panglima Laot/Panglima Lhok

Setiap desa memiliki satu meusanah atau lebih yang berfungsi sebagai tempat ibadah, pusat komunikasi dan informasi, balai musyawarah, tempat penyelesaian perkara, dan pusat kegiatan-kegiatan lainnya.

Gambar - Struktur Kelembagaan Gampong



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO